



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI**

**TAHUN 2021 - 2026**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KOTA BINJAI**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai tahun 2021 – 2026.

Sebagaimana diketahui dalam UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan PP No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Peraturan menteri Dalam Negeri tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan strategis sebagai pola perencanaan jangka menengah serta melaporkan hasil pelaksanaan Renstra tersebut kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai tahun 2021 - 2026 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka mewujudkan Kota Binjai sebagai Kota yang lebih maju, berbudaya dan religius.

Penyusunan renstra ini selain berdasarkan hasil analisa lingkungan internal maupun ekternal organisasi juga telah mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kota Binjai tahun 2021 – 2026. Harapan kami semoga dokumen Rencana Strategis ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Binjai, November 2021



## **DAFTAR ISI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   |           |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   |           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1    Latar Belakang .....   | 1         |
| 1.2    Landasan Hukum .....   | 4         |
| 1.3    Maksud dan Tujuan .....  | 5         |
| 1.4    Sistematika penulisan .....  | 6         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD KOTA BINJAI .....</b>  | <b>10</b> |
| 2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....  | 10        |
| 2.2    Sumber Daya BKD Kota Binjai .....  | 21        |
| 2.3    Kinerja Pelayanan BKD Kota Binjai .....  | 33        |
| 2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ....                                   | 46        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>                                    | <b>49</b> |
| 3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan<br>Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....     | 49        |
| 3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan<br>Wakil Kepala Daerah Terpilih .....              | 51        |
| 3.3    Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan<br>Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ..... | 55        |
| 3.4    Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan<br>Hidup Strategis dan RPJMD .....         | 55        |
| 3.5    Penentuan Isu-isu Strategi .....   | 56        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....</b>   | <b>58</b> |
| 4.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....  | 58        |
| <b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>  | <b>63</b> |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>  | <b>67</b> |
| 6.1    Rencana Program dan Kegiatan .....   | 67        |
| 6.2    Indikator Kinerja .....  | 70        |
| 6.3    Kelompok Sasaran .....   | 71        |
| 6.4    Pendanaan Indikator .....  | 71        |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>  | <b>77</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP.....</b>  | <b>82</b> |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

##### 1.1.1 Pengertian dan Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan /atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026 dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman atau kerangka berpijak Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam penyelenggaraan organisasi dengan dasar kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal organisasi disusun dengan melibatkan *stakeholder* pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026.

Dokumen perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka renstra disusun berpedoman kepada RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai acuan makro dalam pembinaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari internensi politik, bersih dari praktik



korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara didasarkan kepada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi dalam jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik

Oleh karena itu Rancana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026, sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan mengelaborasi pola dan prinsip pembinaan dan manajemen aparatur sipil negara yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan capaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 5 (lima) tahun ke depan.

### **1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**

Proses penyusunan Renstra perangkat daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan renstra terdiri dari :

1. Persiapan penyusunan, meliputi :
  - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
  - b. Penyusunan agenda kerja tim Renstra perangkat daerah
  - c. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD
2. Penyusunan rancangan awal, mencakup :
  - a. Analisis gambaran pelayanan
  - b. Analisis permasalahan
  - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
  - d. Analisis isu strategis
  - e. Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja
  - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah
  - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja pagu indikatif dan kelompok sasaran
3. Penyusunan rancangan akhir, meliputi :
  - a. Rancangan renstra perangkat daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra perangkat daerah .



- b. Rancangan Renstra perangkat daerah dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
  - c. Rancangan Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Binjai untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD
  - d. Verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah
  - e. Perumusan rancangan akhir merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra perangkat daerah menjadi rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
4. Penetapan Renstra.

### **1.1.3 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kota Binjai**

Adapun penyusunan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-2026 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026. Keselarasan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 terkait dalam ***Misi-1 Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan profesional pada tujuan ke 2, Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat dengan sasaran meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, dengan strategi yang ke 5 yaitu Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas.***

Selanjutnya rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai dan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.



## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5887).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perancanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2)



12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 1)
13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13).
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai.
15. Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 50).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai gambaran umum atas setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada 5 (lima) tahun kedepan yang lebih kontekstual dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan aparatur yang handal dan profesional yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tujuan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai tahun 2021-2026 untuk menjadi tolak ukur penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sehingga menghasilkan output yang jelas dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan aparatur serta manajemen aparatur dalam bentuk program-program kegiatan pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan potensi yang ada mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepegawaian di Kota Binjai untuk bersama-sama membangun pondasi bagi terwujudnya pembangunan sumber daya pegawai berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
3. Sebagai acuan kerja dalam penyusunan program kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai;



4. Sebagai acuan untuk menentukan skala prioritas kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai;
5. Sebagai arah bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
6. Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, dan sekaligus sebagai sarana peningkatan kinerja kepegawaian yang lebih baik melalui proses pembelajaran secara terus menerus;

#### **1.4 Sistematika penulisan**

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### *1.1. Latar Belakang*

Mengemukakan secara ringkas pengertian rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah, fungsi rencana strategis Badan kepegawaian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan rencana strategis Badan kepegawaian Daerah, keterkaitan rencan strategis Badan Kepegawaian Daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian/lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

##### *1.2. Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi, kewenangan Badan Kepegawaian Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Badan Kepegawaian Daerah.

##### *1.3. Maksud dan Tujuan*

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-2021.

##### *1.4. Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1.Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah , Struktur organisasi perangkat daerah serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai dengan eselon dibawah kepala perangkat daerah. Uraian tentang struktur organisasi perangkat daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah.

**2.2.Sumber Daya Perangkat Daerah**

Menjelaskan tentang sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

**2.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Menjelaskan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dan /atau indikator lainnya.

**2.4.Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.**

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada 5 (lima) tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH****3.1.Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya.

**3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**



Menjelaskan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah dijelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,

### *3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara*

Menjelaskan tentang keterkaitan tentang Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Renstraperangkat daerah Tahun 2021-2026.

### *3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.*

Menjelaskan tentang peluang perkembangan teknologi dengan rencana mengembangkan pelayanan kepegawaian dengan system apalikasi pelayanan yang terintegrasi keseluruh perangkat daerah.

### *3.5. Penentuan Isu-isu Strategis*

Bagian ini mereview kembali factor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan selanjutnya menjelaskan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

## **BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

### *4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.*

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indicator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

## **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### *5.1. Uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun*

### *5.2 Uraian tentang relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.*



5.3 Tabel Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. *Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menjelaskan rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.*

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menjelaskan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan Indikator kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai.

**BAB VIII : PENUTUP**

**BAB II****GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah. Dalam kedudukanya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Binjai Badan Kepegawaian Daerah merupakan satuan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian daerah dipimpin seorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**a. Tugas Pokok**

Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

**b. Fungsi**

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
3. Pementauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di kepegawaian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai didukung dengan Sekretariat dan dua Bidang dengan rincian tugas dan fungsinya sebagai berikut :

### **1. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Membantu Kepala Badan dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang berkaitan dengan Ketatausahaan, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, penyusunan program, perpendaharaan, mengkoordinasikan bidang-bidang dan urusan umum lainnya.

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Badan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan rencana kegiatan sekretariat;
- b. menyusun laporan kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan sekretariat;
- c. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD);
- e. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- f. mengkoordinir penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- g. mengkoordinir penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP);
- h. mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analis beban kerja;
- i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- j. memeriksa hasil kerja bawahan;
- k. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum, kepegawaian;
- l. melaksanakan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan, dan mengadakan pengawasan aset Badan;
- m. mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya;



## 2. Bidang Kepegawaian

Kepala Bidang Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Bidang Kepegawaian.

Kepala Bidang Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;
- b. merumuskan bahan penyusunan dan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis untuk pembinaan mental aparatur;
- c. melaksanakan pemberian penghargaan dan tanda jasa;
- d. merumuskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahaan masalah.
- e. melaksanakan pemberian kenaikan gaji berkala;
- f. melaksanakan perumusan konsep kebijakan pimpinan yang menyangkut mutasi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan Aparatur;
- h. melaksanakan administrasi perpindahan/mutasi;
- i. melaksanakan penyelesaian administrasi Batas Usia Pensiun dan Kenaikan Pangkat Istimewa;
- j. melaksanakan administrasi usul kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan pengumpulan bahan/data Aparatur Sipil Negara untuk usulan jabatan struktural;
- l. merencanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan menyajikan data pegawai serta mendokumentasikan data aparatur;
- m. memeriksa hasil kerja bawahan;
- n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

## 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan rencana kerja;



- b. menyusun standar perencanaan dan pengelolaan administrasi kediklatan;
- c. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan diklat sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
- d. melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD);
- e. melakukan koordinasi dan evaluasi pra dan pasca penyelenggara Diklat Manajemen Pemerintah serta penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional;
- f. melaksanakan penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintahan, Diklat Teknis dan Fungsional;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan/data Aparatur untuk usulan Jabatan Fungsional tertentu;
- h. merumuskan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan aparatur;
- i. mengkoordinir, penyiapan dan pengolahan bahan informasi yangan berhubungan dengan pengembangan aparatur;
- j. melaksanakan perencanaan dan informasi Aparatur;
- k. melaksanakan pengkajian mengenai pelaksanaan e-government di urusan bidang kepegawaian;
- l. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan dengan pengembangan aparatur;
- m. memeriksa hasil kerja bawahan;
- n. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

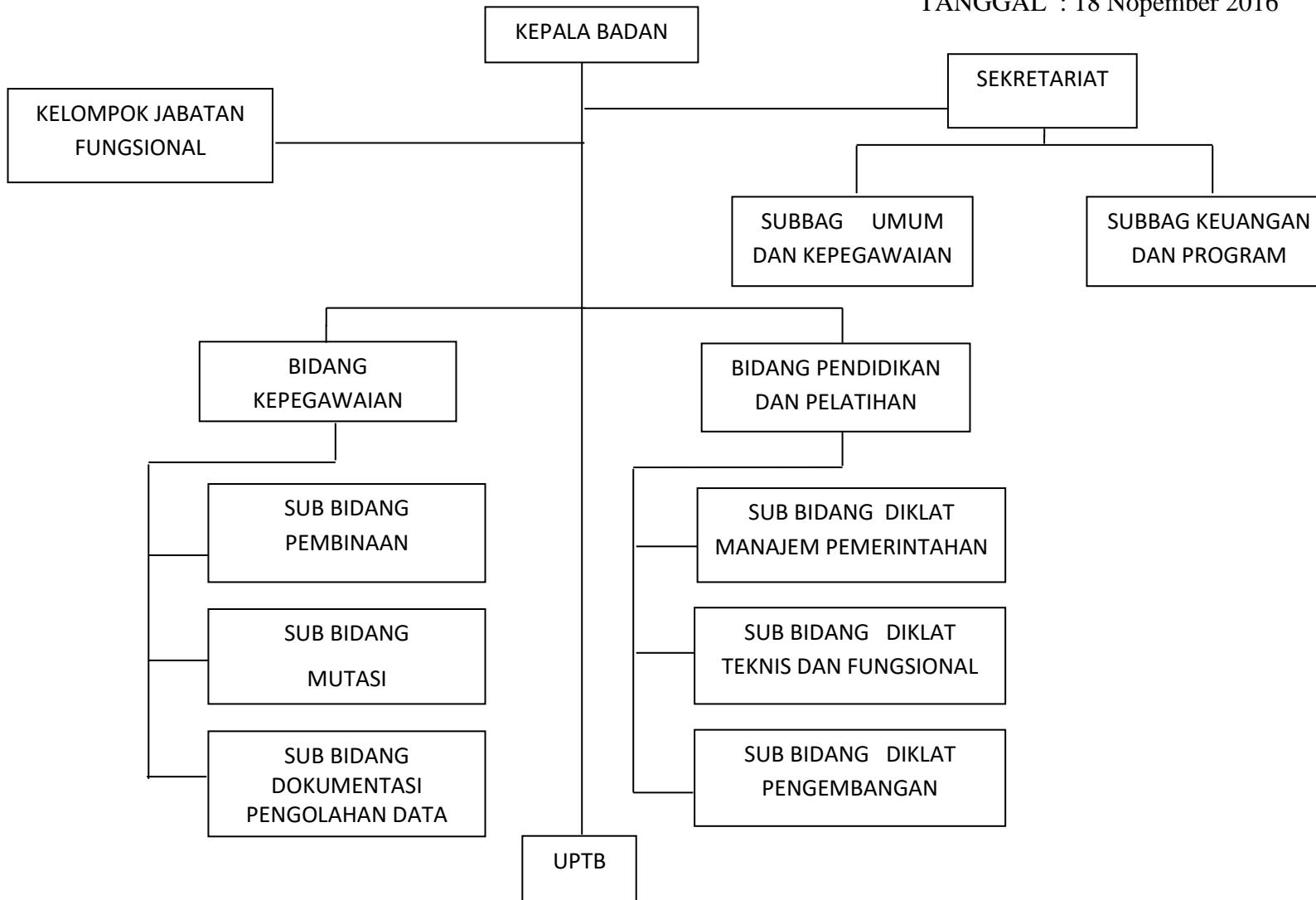


## 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI

### LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 4 Tahun 2016

TANGGAL : 18 Nopember 2016





## 2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai didukung oleh 36 orang pegawai yang terdiri dari 11 pejabat structural, 1 pejabat fungsional widyaiswara, 2 pejabat fungsional analis kepegawaian dan 22 pejabat fungsional umum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai didukung oleh 36 orang personil dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Keadaan Pegawai Negeri sipil menurut jabatan/eselon

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil menurut Tahun 2020

| No. | JABATAN/ESELON       | JUMLAH | %     |
|-----|----------------------|--------|-------|
| 1   | Eselon II            | 1      | 2,77  |
| 2   | Eselon III           | 3      | 8,33  |
| 3   | Eselon IV            | 7      | 19,44 |
| 4   | Widyaiswara          | 1      | 2,77  |
| 5   | Analisis Kepegawaian | 2      | 5,55  |
| 6   | Fungsional Umum      | 22     | 61,13 |
|     | Jumlah               | 36     | 100   |

- b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Formal PNS Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

Tahun 2020

| No. | Pendidikan               | JUMLAH | %     |
|-----|--------------------------|--------|-------|
| 1   | Pascasarjana (S-2)       | 4      | 11,11 |
| 2   | Sarjana (S-1)/Diploma IV | 22     | 61,11 |
| 3   | Diploma III              | 2      | 5,55  |
| 4   | SLTA Sederajat           | 8      | 22,23 |



|  |        |    |     |
|--|--------|----|-----|
|  | Jumlah | 36 | 100 |
|--|--------|----|-----|

Dari data table 2.2 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S-1) yang berjumlah 22 orang atau 61,11% dan Pascasarjana berjumlah 4 orang atau 11,11%. Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai baik

c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang :

| No | Golongan | Ruang         |   |   |   | Jumlah    | Percentase  |
|----|----------|---------------|---|---|---|-----------|-------------|
|    |          | A             | B | C | D |           |             |
| 1. | IV       | 2             | 2 | - | - | 4         | 11,11%      |
| 2. | III      | 8             | 6 | 4 | 7 | 25        | 69,44%      |
| 3. | II       | -             | 1 | 4 | 2 | 7         | 19,45%      |
| 4. | I        | -             | - | - | - | -         | 0%          |
|    |          | <b>Jumlah</b> |   |   |   | <b>36</b> | <b>100%</b> |

Berdasarkan data pada table 2.3 diketahui bahwa pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 25 orang atau 69,44%.

d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Tabel 2.4

Tingkat Pendidikan Penjenjangan PNS Badan Kepegawaian Daerah Kota

Binjai

Tahun 2020

| No. | Pendidikan                      | JUMLAH   | %          |
|-----|---------------------------------|----------|------------|
| 1   | Diklatpim IV/ (Adum dan Adumla) | 6        | 85,71      |
| 2   | Diklatpim III (SPAMA)           | 1        | 14,29      |
| 3   | Diklatpim II (SPAMEN)           | 0        | 0          |
|     | <b>Jumlah</b>                   | <b>7</b> | <b>100</b> |



Dari table data table 2.4 menggambarkan bahwa pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 7 orang atau 19,44% dari total pegawai negeri sipil yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

### 2.2.2 Sarana dan Pasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai telah diinventarisir pada Kartu Inventaris Barang Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
  - a. Peralatan kantor dan Rumah Tangga
  - b. Kendaraan dinas/operasional
  - c. Peralatan studio dan komunikasi
3. Gedung dan Bangunan
4. Asset Tetap Lainnya

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai berikut :

Tabel. 2.4.  
Sarana dan Prasarana

| No | Nama Barang                           | Jumlah (unit) | Keterangan     |
|----|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 1  | Tanah Bangunan Kantor                 | 596 M2        |                |
| 2  | Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan | 1.222 M2      |                |
| 3  | Ruang Belajar                         | 2 unit        |                |
| 4  | Ruang Makan                           | 2 unit        |                |
| 5  | Kamar                                 | 11 unit       |                |
| 6  | Electric Generating                   | 1             |                |
| 7  | Pompa                                 | 2             |                |
| 8  | Kendaraan Roda 4                      | 2             |                |
| 9  | Kendaraan Roda 2                      | 8             | 2 rusak berat  |
| 10 | Elektrik Panel Control                | 1             |                |
| 11 | Mesin tik                             | 3             |                |
| 12 | Kalkulator                            | 5             |                |
| 13 | Lemari/Kayu/metal                     | 21            | 2 rusak berat  |
| 14 | Filling Cabinet                       | 25            |                |
| 15 | Peti Uang                             | 1             |                |
| 16 | Perkakas Kantor                       | 11            |                |
| 17 | Penghancur Kertas                     | 1             |                |
| 18 | Papan nama instansi                   | 2             |                |
| 19 | White board                           | 4             |                |
| 20 | Alat kantor lainnya                   | 23            |                |
| 21 | Kursi besi/metal                      | 95            | 10 rusak berat |
| 22 | Meja Kerja                            | 34            | 13 rusak berat |



|    |                                   |     |                  |
|----|-----------------------------------|-----|------------------|
| 23 | Meja Belajar                      | 20  | Milik Ex Gdg SLB |
| 24 | Tempat tidur bertingkat           | 20  |                  |
| 25 | Meja rapat                        | 1   |                  |
| 26 | Meja makan/besi                   | 16  |                  |
| 27 | Meja Reseption                    | 1   |                  |
| 28 | Meja Panjang                      | 3   |                  |
| 29 | Kursi Rapat                       | 15  |                  |
| 30 | Kursi Putar                       | 55  | 34 rusak berat   |
| 31 | Kursi lipat                       | 114 |                  |
| 32 | Meja Komputer                     | 24  |                  |
| 33 | Kursi Plastik                     | 30  |                  |
| 34 | Karpet/Permadani                  | 10  | 10 rusak berat   |
| 35 | AC                                | 42  | 2 rusak berat    |
| 36 | Kipas Angin                       | 5   | 1 rusak ringan   |
| 37 | Ex hause van                      | 6   |                  |
| 38 | Loudspeaker                       | 2   |                  |
| 39 | Kamera                            | 3   |                  |
| 40 | Handy Cam                         | 1   |                  |
| 41 | Alat rumah tangga lain            | 14  |                  |
| 43 | Komputer PC                       | 31  | 6 rusak berat    |
| 44 | Mesin Faximile                    | 2   |                  |
| 45 | Printer                           | 43  | 1 rusak berat    |
| 46 | Scanner                           | 2   |                  |
| 47 | Peralatan mini computer lain-lain | 8   |                  |
| 49 | Kursi Tamu                        | 3   | 1 rusak berat    |
| 50 | Kursi kerja pejabat eselon II     | 2   | 1 rusak berat    |
| 51 | Kursi kerja pejabat eselon III    | 1   |                  |
| 52 | Microphone/Wireless Mic           | 1   |                  |
| 53 | Microphone/Boom stand             | 2   |                  |
| 54 | Power Supply Microphone           | 1   |                  |
| 55 | Dispenser                         | 4   | 2 rusak berat    |
| 56 | Vacum cleaner                     | 1   |                  |
| 57 | Laptop                            | 13  | 2 rusak berat    |
| 58 | Karpet Ruang Kepala               | 5   | Meter            |
| 60 | UPS                               | 41  | 3 rusak berat    |
| 61 | Televisi                          | 6   |                  |
| 62 | Mesin Penghancur Kertas           | 1   |                  |
| 63 | Baki Dokumen                      | 5   |                  |
| 64 | Server                            | 2   |                  |
| 65 | Infokus/Layar                     | 1   |                  |
| 66 | Program SIMPEG dan SAPK           | 2   |                  |
| 67 | Kasur                             | 61  | 32 rusak berat   |
| 68 | Bantal                            | 122 | 40 rusak berat   |
| 69 | Kaca meja                         | 20  |                  |
| 70 | Kursi makan                       | 130 |                  |
| 71 | Seprei                            | 46  | 30 rusak berat   |
| 72 | Gordyn                            | 31  |                  |
| 73 | Wireless                          | 1   |                  |
| 74 | CCTV                              | 1   |                  |
| 75 | Pompa Lain-lain                   | 2   |                  |
| 76 | Overhead                          | 2   |                  |
| 77 | Handycam                          | 1   |                  |



|    |                        |    |  |
|----|------------------------|----|--|
| 78 | Stabilizer             | 8  |  |
| 79 | Generator set          | 1  |  |
| 80 | Buku Peraturan/Bacaan  | 16 |  |
| 81 | Bangunan Gedung Kantor | 1  |  |
| 82 | TV layar data          | 2  |  |

### 2.2.3 Kondisi Umum Kepegawaian Pemerintah Kota Binjai

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi, aparatur dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalitas, produktifitas kerja sehingga terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dibutuhkan pengelolaan sumber daya aparatur secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

Berikut beberapa data kepegawaian yang dapat disajikan per 31 Desember 2020.

Tabel 2.5.

Komposisi ASN Pemerintah Kota Binjai Menurut Jenjang Kepangkatan

| No    | Golongan | A   | B   | C   | D   | E | Jumlah |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|---|--------|
| 1     | I        | 1   | 24  | 7   | 35  | - | 67     |
| 2     | II       | 19  | 94  | 193 | 167 | - | 473    |
| 3     | III      | 408 | 633 | 786 | 907 | - | 2.734  |
| 4     | IV       | 511 | 604 | 59  | 2   | 1 | 1.177  |
| Total |          |     |     |     |     |   | 4.451  |

Komposisi jenjang kepangkatan tersebut di atas, dari 4.451 pegawai yang ada sebahagian masih pada golongan I dan II yang mempunyai kompetensi manajerial teknis, sehingga masih sangat mempengaruhi pencapaian pelayanan kepada publik dalam melaksanakan tugasnya.

Tabel 2.6

Komposisi ASN Pemerintah Kota Binjai Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan    | Jumlah | Persentase |
|----|---------------|--------|------------|
| 1  | SD            | 42     | 0,95       |
| 2  | SMP           | 52     | 1,16       |
| 3  | SMU/SLTA/SMK/ | 598    | 13,43      |



|    |               |              |             |
|----|---------------|--------------|-------------|
| 4  | D1            | 11           | 0,25        |
| 5  | D2            | 102          | 2,30        |
| 6  | D-3           | 452          | 10,14       |
| 7. | D4            | 90           | 2,03        |
| 8  | S-1           | 2.845        | 63,92       |
| 9  | S-2           | 259          | 5,82        |
| 10 | S-3           | -            | -           |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>4.451</b> | <b>100%</b> |

Meskipun pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam berkinerja, namun tingkat pendidikan masih menjadi salah satu kompetensi yang menentukan kualitas dan keunggulan daya nalar sumber daya aparatur. Kondisi tingkat pendidikan berdasarkan tabel di atas sangat perlu mendapat perhatian dalam rangka menghadapi tantangan organisasi dan pencapaian misi ke depan

Tabel 2.7

## Komposisi ASN Pemerintah Kota Binjai Menurut Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin      | Jumlah       | Persentase |
|----|--------------------|--------------|------------|
| 1  | Laki -laki         | 1.533        | 34,45      |
| 2  | Perempuan          | 2.918        | 65,55      |
|    | <b>Jumlah.....</b> | <b>4.451</b> | <b>100</b> |

Berikut data jumlah Pegawai berdasarkan nama jabatan fungsional :

Tabel 2.8

## Komposisi ASN dan Jumlah ASN Fungsional Tertentu

Pemerintah

Kota Binjai

| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Kesehatan) | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
|----|---|-------------------|------|
| 1  | Dokter  | 98                |      |
| 2  | Dokter Gigi                                   | 36                |      |
| 3  | Penyuluh Kesehatan                            | 69                |      |



|        |  |     |  |
|--------|--|-----|--|
| 4      | Masyarakat                                     | 14  |  |
| 5      | Apoteker                                       | 46  |  |
| 6      | Asisten Apoteker                               | 358 |  |
| 7      | Perawat  | 141 |  |
| 8      | Bidan  | 40  |  |
| 9      | Pranata Laboratorium                           | 15  |  |
| 10     | Kesehatan                                      | 18  |  |
| 11     | Sanitarian                                     | 31  |  |
| 12     | Nutrisionis                                    | 2   |  |
| 13     | Perawat Gigi                                   | -   |  |
| 14     | Teknisi Elektromedis                           | 3   |  |
| 15     | Entomolog Kesehatan                            | 4   |  |
| 16     | Rekam Medis                                    | -   |  |
| 17     | Retraksionis optisien                          | 3   |  |
| 18     | Epidemiolog Kesehatan                          | 7   |  |
| 19     | Administrator Kesehatan                        | 1   |  |
| 20     | Fisioterapis<br>Radiografer<br>Okupasi Terapis | 1   |  |
| Jumlah |  | 887 |  |

| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Pendidikan) | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
|----|--|-------------------|------|
| 1  | Penilik  | 2                 |      |
| 2  | Pengawas Sekolah                               | 19                |      |
| 3  | Pamong Belajar                                 | 9                 |      |
| 4  | Guru   | 1.533             |      |
| 5. | Laktor Kepala                                  | -                 |      |
|    | Jumlah   | 1.563             |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Pertanian)  | Jumlah<br>(orang) | Ket. |



|   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Penyuluhan Pertanian                        | 20 |  |
| 2 | Pengendali Organisme<br>Pengganggu Tumbuhan | 1  |  |
| 3 | Pengawas Benih Tanaman                      | -  |  |
| 4 | Medik Veteriner                             | 1  |  |
| 5 | Pengawas Benih Ikan                         | -  |  |
| 6 | Paramedik Veteriner                         | -  |  |
| 7 | Penyuluhan Peternakan                       | -  |  |
| 8 | Penyuluhan Perikanan                        | -  |  |
|   | Jumlah                                      | 22 |  |



| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Koperasi, UKM dan<br>Perdagangan)       | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
|----|--|-------------------|------|
| 1  | Penera   | -                 |      |
| 2  | Penguji Mutu Barang  | -                 |      |
| 3  | Penyuluhan Perindustrian dan<br>Perdagangan                                | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Perhubungan/Transportasi)               | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Penguji Kenderaan Bermotor   | -                 |      |
| 2  | Teknik Jalan dan Jembatan  | -                 |      |
| 3  | Teknik Pengairan   | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Tata Ruang, Perumahan dan<br>Pemukiman) | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Teknik Tata Bangunan dan<br>Perumahan                                      | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Sosial dan Tenaga Kerja)                | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Pekerja Sosial   | -                 |      |
| 2  | Pengantar Kerja  | -                 |      |
| 3  | Pengawas Ketenagakerjaan   | -                 |      |
| 4  | Instruktur   | -                 |      |
| 5  | Penggerak Swadaya Masyarakat   | -                 |      |
| 6  | Perantara Hubungan Industrial  | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah<br>Raga)    | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Pamong Budaya  | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |



| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Keluarga Berencana dan<br>Pemberdayaan Perempuan) | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
|----|--|-------------------|------|
| 1  | Penyuluhan Keluarga Berencana  | 2                 |      |
|    | Jumlah   | 2                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Inspektorat)                                      | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Auditor  | 20                |      |
| 2  | Pejabat Pengawas Untuk Pemerintah Daerah<br>(P2UPD)                                  | 8                 |      |
|    | Jumlah   | 28                |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Perencanaan Bappeda)                              | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Perencana  | -                 |      |
| 2  | Peneliti   | -                 |      |
| 3  | Surveyor Pemetaan  | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Kepegawaian)                                      | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Analis Kepegawaian   | 2                 |      |
| 2  | Widyaaiswara   | 1                 |      |
|    | Jumlah   | 3                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Lingkungan Hidup)                                 | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Pengendali Dampak Lingkungan   | -                 |      |
| 2  | Teknik Penyehatan Lingkungan   | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |
| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Perpustakaan dan Arsip)                           | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
| 1  | Pustakawan   | -                 |      |
| 2  | Arsiparis  | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |



| No | Nama Jabatan Fungsional<br>(Bidang Sekretariat/Umum) | Jumlah<br>(orang) | Ket. |
|----|--|-------------------|------|
| 1  | Pranata Komputer                                     | -                 |      |
| 2  | Operator Transmisi Sandi                             | -                 |      |
| 3  | Perancang Peraturan<br>Perundang-undangan            | -                 |      |
| 4  | Pranata Hubungan<br>Masyarakat                       | -                 |      |
|    | Jumlah   | -                 |      |

Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna.

Sejalan dengan berlakunya UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan jabatan karier PNS terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasilguna didalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Pemberdayaan tenaga fungsional lebih berkembang dan dituntut kualifikasi dan kompetensi. Dari beberapa jabatan fungsional tertentu pada tabel diatas masih banyak jabatan yang belum terisi berkisar 40 % dari 60 jabatan fungsional tertentu yang ada, sehingga sangat perlu mendapat perhatian untuk mengisi jabatan tersebut pada tahun-tahun berikutnya sebagai pencapaian misi.



**Tabel 2.8**  
Jumlah Pejabat Struktural yang Telah Mengikuti Diklat  
dilingkungan Pemerintah Kota Binjai

| No | Jumlah Jabatan | Jumlah Jabatan | Jumlah Pejabat | Jumlah yang telah mengikuti diklat | Jumlah yang belum mengikuti diklat | %     |
|----|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|
| 1  | Eselon II.a    | 1              | 1              | 1                                  | 0                                  | 100   |
| 2  | Eselon II.b    | 32             | 28             | 5                                  | 23                                 | 17,86 |
| 3  | Eselon III     | 130            | 124            | 87                                 | 37                                 | 70,16 |
| 4  | Eselon IV      | 596            | 507            | 305                                | 282                                | 51,96 |
|    | Jumlah         | 759            | 740            | 398                                | 342                                | 53,78 |

Dari data table 2.8 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklatpim sebesar 53,78% atau 398 Pejabat dari 740 Pejabat Struktural yang ada dan Pejabat Struktural yang belum mengikuti pendidikan Diklatpim sebesar 46,22% atau 342 Pejabat. Untuk itu pelaksanaan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur.

**Tabel 2.9**  
Daftar ASN Mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional  
dilingkungan Pemerintah Kota Binjai Tahun 2016-2020

| No    | Tahun | Diklat Teknis |         |     | Diklat Fungsional |          |     |
|-------|-------|---------------|---------|-----|-------------------|----------|-----|
|       |       | Target        | Capaian | %   | Target            | Capaia n | %   |
| 1     | 2016  | 240           | 240     | 100 | 120               | 120      | 100 |
| 2     | 2017  | 515           | 401     | 78  | 80                | 65       | 81  |
| 3     | 2018  | 486           | 566     | 116 | 0                 | 0        | 0   |
| 4     | 2019  | 0             | 0       | 0   | 146               | 128      | 88  |
| 5     | 2020  | 42            | 0       | 0   | 0                 | 0        | 0   |
| Total |       | 1.283         | 1.207   | 94  | 346               | 313      | 90  |



Dari tabel tabel 2.9 tersebut di atas ASN yang mengikuti Diklat Teknis sebanyak 1.207 orang peserta atau 94 % dan mengikuti Diklat Fungsional 313 orang peserta atau 90% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.10

## Pelanggaran Displin PNS

| No | Tahun        | Berat     | Sedang   | Ringan    | Pemberhentian Sementara | Jumlah    |
|----|--------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1  | 2016         | 2         | -        | 17        | 6                       | 25        |
| 2  | 2017         | 5         | -        | -         | 1                       | 6         |
| 3  | 2018         | 12        | -        | -         | 4                       | 16        |
| 4  | 2019         | 8         | -        | -         | 2                       | 10        |
| 5  | 2020         | 2         | 5        | 1         | -                       | 8         |
|    | <b>Total</b> | <b>29</b> | <b>5</b> | <b>18</b> | <b>13</b>               | <b>65</b> |

Disiplin PNS merupakan kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, keteraturan dan ketertiban. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin PNS yaitu faktor kesadaran, faktor keteladanan, faktor motivasi dan faktor penegakan peraturan. Penegakan disiplin PNS perlu dilaksanakan secara terus menerus dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pembinaan dan penerapan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah Pelanggaran disiplin pada setiap tahunnya mulai pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Dengan demikian, disiplin PNS pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

### 2.3.1. Capaian Kinerja Utama

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur bagaimana kinerja maka diperlukan ukuran -ukuran yang dapat menggambarkan keberhasilan dari kinerja itu sendiri atau dinamakan



dengan indikator. Indikator dapat berupa indikator keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai melalui Renstra 2016-2021 Indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya
2. Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional.
3. Persentase pelanggaran disiplin PNS.

### **2.3.2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Selama periode 2016-2020, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian visi Kota Binjai di Bidang Kepegawaian. Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai berdasarkan realisasi capaian indikator sasaran selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana pada tabel T-C.23 sebagai berikut :



Tabels T-C. 23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat  
Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

|     | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD  | Satuan | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target |       |       |       |       | Realisasi Capaian Kinerja |       |       |       |       | Rasio Capaian pada Tahun ke |        |         |         |        |
|-----|---|--------|------------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|
|     |   |        |            |                          | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2016                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2016                        | 2017   | 2018    | 2019    | 2020   |
| (1) | (2)   | (3)    | (4)        | (5)                      | (6)    | (7)   | (8)   | (9)   | (10)  | (11)                      | (12)  | (13)  | (14)  | (16)  | (17)                        | (18)   | (19)    | (20)    |        |
| 1   | Jumlah Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya | orang  |            |                          | 867    | 537   | 646   | 722   | 740   | 527                       | 422   | 321   | 313   | 398   | 60,78%                      | 78,58% | 49,69%  | 43,35%  | 53,78% |
| 2   | Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional  | orang  |            |                          | 360    | 595   | 480   | 146   | 137   | 360                       | 446   | 566   | 271   | 0     | 100%                        | 74,96% | 117,91% | 186,61% | 0%     |
| 3   | Persentase pelanggaran disiplin PNS   | %      |            |                          | 0,43   | 0,39  | 0,42  | 0,32  | 0,31  | 0,22                      | 0,22  | 0,11  | 0,22  | 0,18  | 51,16%                      | 56,41% | 26,19%  | 68,75%  | 58,06% |
| 4   | Jumlah PNS yang mengikuti ujian Dinas   | orang  |            |                          | 0      | 50    | 50    | 0     | 150   | 0                         | 70    | 0     | 0     | 66    | 0%                          | 140%   | 0%      | 0%      | 44%    |
| 5   | Jumlah PNS yang mengikuti ujian Penyesuaian ijazah  | orang  |            |                          | 90     | 80    | 60    | 0     | 0     | 90                        | 33    | 30    | 0     | 0     | 100%                        | 41%    | 63%     | 0%      | 0%     |
| 6   | Jumlah PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat  | SK     |            |                          | 1.150  | 1.100 | 950   | 950   | 1.050 | 1.103                     | 846   | 868   | 898   | 482   | 96%                         | 77%    | 91%     | 95%     | 46%    |
| 7   | Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas                                  | orang  |            |                          | 32     | 34    | 4     | 1     | 2     | 11                        | 2     | 2     | 2     | 3     | 34%                         | 6%     | 50%     | 200%    | 150%   |
| 8   | Jumlah PNS penerima satya lencana karya satya   | orang  |            |                          | 90     | 180   | 120   | 60    | 180   | 80                        | 82    | 80    | 0     | 173   | 89%                         | 46%    | 67%     | 0%      | 96%    |
| 9   | Jumlah PNS mendapatkan kenaikan gaji berkala  | orang  |            |                          | 3.100  | 1.950 | 1.950 | 1.860 | 2.050 | 2.834                     | 1.893 | 2.167 | 1.855 | 2.045 | 91%                         | 97%    | 111%    | 100%    | 100%   |



|    |   |         |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |     |
|----|---|---------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 10 | Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi jabatan/pengembangan karir dengan merit sistem | jabatan |  |  | 38  | 10  | 8   | 20  | 4   | 26  | 11  | 16  | 20  | 0%   | 68%  | 110% | 200% | 100% | 0%  |
| 11 | Jumlah PNS yang menyelesaikan administrasi pensiun                                      | orang   |  |  | 160 | 150 | 150 | 200 | 230 | 148 | 189 | 185 | 199 | 219% | 93%  | 126% | 123% | 100% | 95% |
| 12 | Jumlah PNS yang wajib LHKPN   | orang   |  |  | 52  | 82  | 82  | 142 | 215 | 50  | 52  | 142 | 277 | 211% | 96%  | 63%  | 173% | 195% | 98% |
| 13 | Jumlah PNS yang mendapatkan ijin cuti   | orang   |  |  | 500 | 500 | 500 | 650 | 150 | 502 | 452 | 490 | 634 | 142% | 100% | 90%  | 98%  | 98%  | 95% |
| 14 | Jumlah PNS yang mendapatkan ijin belajar  | orang   |  |  | 100 | 150 | 100 | 60  | 80  | 110 | 99  | 127 | 54  | 71%  | 110% | 66%  | 127% | 90%  | 89% |



Berdasarkan table T-C. 23 pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ada beberapa permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur untuk mengikuti Diklat Kompetensi, Teknis dan fungsional pada tahun 2016-2020 dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah pejabat struktual yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan cenderung berkurang dari tahun ketahun, yaitu pada tahun 2016 terdapat 527 orang pejabat yang telah mengikuti diklat kompetensi kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 398 orang atau 53,74% dari jumlah pejabat struktural. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan jumlah kouta yang ditetapkan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga yang telah terakreditasi.
2. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional cenderung berkurang dari tahun ketahun yaitu pada tahun 2016 jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 360 orang atau 6,92% dari jumlah Aparatur yang ada. Kemudian pada tahun 2020 tidak ada pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan fungsional karena adanya Recofussing kegiatan dan realokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional perlu ditingkatkan.
3. Persentase pelanggaran disiplin PNS juga cenderung menurun dari tahun ketahun, pada tahun 2016 persentase pelanggaran disiplin PNS sebesar 0,23% kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 0,18%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat disiplin PNS pada setiap tahunnya mengalami peningkatan.

### **2.3.3. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah**

#### **1. Anggaran**

Alokasi anggaran Belanja Langsung Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai yang tertampung dalam APBD Kota Binjai cenderung peningkatan dari tahun ke tahun , pada tahun 2016 anggaran sebesar



3.470.499.900,- pada tahun 2019 anggaran sebesar 4.093.015.950 sedangkan pada tahun 2020 besaran anggaran adalah 2.124.207.014 mengalami penurunan disebabkan reconfusing kegiatan dan realokasi anggaran.

Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kota Binjai konsisten dalam upaya peningkatan kualitas/kompetensi sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Sebagai gambaran kenaikan anggaran kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

| Tahun | Anggaran      | Ket           |
|-------|---------------|---------------|
| 2016  | 3.470.499.900 | -             |
| 2017  | 3.717.690.130 | Naik 7,12 %   |
| 2018  | 4.102.273.418 | Naik 10,34 %  |
| 2019  | 4.093.015.950 | Turun 0,23 %  |
| 2020  | 2.124.207.041 | Turun 48,11 % |

## 2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai mengalami peningkatan dari tahun ketahun, tingkat realisasi anggaran pada tahun 2016 adalah 76,09%, Tahun 2019 tingkat realisasi anggaran adalah 90,99% namun pada tahun 2020 tingkat realisasi anggaran adalah 69,35% mengalami penurunan disebabkan adanya wabah covid-19.

Sebagai gambaran kenaikan realisasi anggaran kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut :

| Tahun | Realisasi     | Persentase | Ket          |
|-------|---------------|------------|--------------|
| 2016  | 2.640.589.642 | 76,09      | -            |
| 2017  | 3.102.810.752 | 83,46      | Naik 17,50 % |
| 2018  | 3.122.079.440 | 76,11      | Naik 0,62 %  |
| 2019  | 3.724.048.185 | 90,99      | Naik 19,28 % |
| 2020  | 1.473.054.776 | 69,35      | Turun 60,45% |

Selama periode 2016-2020, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai telah menyelenggarakan beberapa



program kegiatan guna menunjang pencapaian visi Kota Binjai di Bidang Kepegawaian. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana pada tabel T-C.24 sebagai berikut :



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KOTA BINJAI**

Tabel CT 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai

Tahun 2016-2020

| Uraian   | Anggaran pada Tahun ke- (Rp) |             |             |               |             | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp) |             |             |              |              | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |              |              |              |              | Rata-rata Pertumbuhan |                   |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|
|  | 2016<br>(1)<br>(2)           | 2017<br>(3) | 2018<br>(4) | 2019<br>(5)   | 2020<br>(6) | 2016<br>(7)                            | 2017<br>(8) | 2018<br>(9) | 2019<br>(10) | 2020<br>(11) | 2016<br>(12)                                  | 2017<br>(13) | 2018<br>(14) | 2019<br>(15) | 2020<br>(16) | Anggaran<br>(17)      | Realisasi<br>(18) |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran             | 758.637.800                  | 842.347.000 | 850.438.609 | 1.020.910.520 | 777.168.628 | 630.747.755                            | 726.736.036 | 678.617.420 | 898.241.483  | 684.254.159  | 83,14%  | 86,28%       | 79,80%       | 87,98%       | 88,04%       | 3.706.166             | 10.701.281        |
| Penyediaan Jasa surat menyurat                         | 36.500.000                   | 35.500.000  | 40.725.000  | 112400000     | 6.500.000   | 31.743.920                             | 31.453.700  | 37.689.500  | 77.303.500   | 3.260.500    | 86,97%  | 88,60%       | 92,55%       | 68,78%       | 50,16%       | -6.000.000            | -5.696.684        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik | 179.500.000                  | 186.500.000 | 209.575.040 | 228600000     | 213.000.000 | 116.478.124                            | 121.751.587 | 147.948.041 | 173.703.091  | 159.227.773  | 64,89%  | 65,28%       | 70,59%       | 75,99%       | 74,75%       | 6.700.000             | 8.549.930         |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                      | 85.200.000                   | 85.200.000  | 72.578.000  | 63985650      | 78.696.228  | 85.189.850                             | 84.904.250  | 70.604.000  | 63.984.700   | 72.655.200   | 99,99%  | 99,65%       | 97,28%       | 100,00%      | 92,32%       | -1.300.754            | -2.506.930        |
| Penyediaan alat tulis Kantor                           | 77.697.800                   | 84.867.000  | 86.491.919  | 56276500      | 62.042.220  | 77.694.350                             | 84.678.100  | 71.360.200  | 55.932.500   | 61.936.000   | 100,00%                                       | 99,78%       | 82,51%       | 99,39%       | 99,83%       | -3.131.116            | -3.151.670        |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan              | 80.000.000                   | 83.000.000  | 83.040.400  | 45331070      | 62.322.820  | 67.488.600                             | 68.515.400  | 63.681.600  | 38.823.750   | 54.976.600   | 84,36%  | 82,55%       | 76,69%       | 85,64%       | 88,21%       | -3.535.436            | -2.502.400        |
| Penyediaan Komponen instalasi/peneranga                | 10.000.000                   | 40.000.000  | 41.903.750  | 9343000       | 12.373.560  | 2.799.500                              | 35.410.000  | 24.237.800  | 5.978.000    | 8.844.300    | 28,00%  | 88,53%       | 57,84%       | 63,98%       | 71,48%       | 474.712               | 1.208.960         |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang        | 18.700.000                   | 18.700.000  | 18.020.000  | 14700000      | 15.240.000  | 16.010.000                             | 15.232.000  | 13.500.000  | 14.700.000   | 15.240.000   | 85,61%  | 81,45%       | 74,92%       | 100,00%      | 100,00%      | -692.000              | -154.000          |
| Penyediaan makanan dan minuman                         | 20.500.000                   | 20.500.000  | 20.500.000  | 17000000      | 16.891.200  | 12.962.000                             | 13.010.000  | 12.365.000  | 15.078.000   | 6.723.500    | 63,23%  | 63,46%       | 60,32%       | 88,69%       | 39,80%       | -721.760              | -1.247.700        |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah   | 150.000.000                  | 212.600.000 | 203.205.000 | 378428000     | 94.167.400  | 146.471.411                            | 197.530.999 | 164.991.279 | 358.336.378  | 92.044.354   | 97,65%  | 92,91%       | 81,19%       | 94,69%       | 97,75%       | -11.166.520           | -10.885.411       |
| Penyediaan jasa pengelola administrasi keuangan SKPD   | 69.840.000                   | 75.480.000  | 74.399.500  | 90809700      | 209.935.200 | 66.060.000                             | 74.250.000  | 72.240.000  | 90.809.700   | 206.634.700  | 94,59%  | 98,37%       | 97,10%       | 100,00%      | 98,43%       | 28.019.040            | 28.114.940        |
| Penyediaan Jasa Pengelola Website                      | 30.700.000                   | 0           | 0           | 0             | 0           | 7.850.000                              | 0           | 0           | 0            | 0            | 25,57%  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | -6.140.000            | -1.570.000        |
| Penyediaan Jasa Premi BPJS Ketenagakerjaan             | 0                            | 0           | 0           | 4036600       | 6.000.000   | 0                                      | 0           | 0           | 3.591.864    | 2.711.232    | 0,00%   | 0,00%        | 0,00%        | 88,98%       | 45,19%       | 1.200.000             | 542.246           |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

## KOTA BINJAI

|  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |        |        |        |        |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur                              | 407.171.000 | 699.476.830 | 714.749.350 | 323.215.200 | 281.478.768 | 318.657.637 | 635.832.516 | 630.600.406 | 289.333.262 | 148.462.530 | 78,26% | 90,90% | 88,23% | 89,52% | 52,74% | -25.138.446 | -34.039.021 |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor   | 0           | 24.464.000  | 75.810.350  | 25.258.200  | 0           | 0           | 23.550.000  | 67.771.500  | 23.175.000  | 0           | 0,00%  | 96,26% | 89,40% | 91,75% | 0,00%  | 0           | 0           |
| Pengadaan peralatan gedung kantor  | 55.974.000  | 338.638.000 | 65.382.000  | 0           | 110.510.300 | 55.957.000  | 331.707.000 | 61.165.000  | 0           | 0           | 99,97% | 97,95% | 93,55% | 0,00%  | 0,00%  | 10.907.260  | -11.191.400 |
| Pengadaan mebelleur  | 121.547.000 | 53.541.000  | 49.480.000  | 26.487.000  | 0           | 114.570.000 | 45.203.000  | 47.350.000  | 26.319.000  | 0           | 94,26% | 84,43% | 95,70% | 99,37% | 0,00%  | -24.309.400 | -22.914.000 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                       | 57.000.000  | 106.133.830 | 345.000.000 | 119.060.000 | 27.940.000  | 42.375.000  | 99.570.000  | 329.238.000 | 113.739.000 | 24.981.840  | 74,34% | 93,82% | 95,43% | 95,53% | 89,41% | -5.812.000  | -3.478.632  |
| Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional                       | 83.850.000  | 75.700.000  | 81.277.000  | 71.440.000  | 74.252.468  | 42.344.775  | 50.164.766  | 48.303.406  | 51.824.702  | 56.100.390  | 50,50% | 66,27% | 59,43% | 72,54% | 75,55% | -1.919.506  | 2.751.123   |
| Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor                            | 50.000.000  | 52.000.000  | 61.950.000  | 45.300.000  | 37.539.000  | 48.610.000  | 45.855.000  | 44.475.000  | 43.125.000  | 36.675.000  | 97,22% | 88,18% | 71,79% | 95,20% | 97,70% | -2.492.200  | -2.387.000  |
| Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor                          | 35.800.000  | 46.000.000  | 33.350.000  | 35.670.000  | 31.237.000  | 14.800.862  | 39.782.750  | 32.297.500  | 31.150.560  | 30.705.300  | 41,34% | 86,48% | 96,84% | 87,33% | 98,30% | -912.600    | 3.180.888   |
| Pemeliharaan rutin/berkala mebelleur   | 3.000.000   | 3.000.000   | 2.500.000   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -600.000    | 0           |
| Program Peningkatan disiplin aparatur  | 0           | 54.280.000  | 20.000.000  | 19.000.000  | 0           | 0           | 39.320.000  | 13.440.000  | 17.575.000  | 0           | 0,00%  | 72,44% | 67,20% | 92,50% | 0,00%  | 0           | 0           |
| Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                | 0           | 23.800.000  | 0           | 0           | 0           | 0           | 19.635.000  | 0           | 0           | 0           | 0,00%  | 82,50% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0           | 0           |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                                    | 0           | 30.480.000  | 20.000.000  | 19.000.000  | 0           | 0           | 19.685.000  | 13.440.000  | 17.575.000  | 0           | 0,00%  | 64,58% | 67,20% | 92,50% | 0,00%  | 0           | 0           |
| Program peningkatan pengembangan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan | 18.730.000  | 14.305.000  | 7.425.000   | 5.089.500   | 1.627.350   | 17.793.000  | 11.736.000  | 6.300.000   | 0           | 1.044.700   | 95,00% | 82,04% | 84,85% | 0,00%  | 64,20% | -3.420.530  | -3.349.660  |
| Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                   | 6.280.000   | 6.905.000   | 7.425.000   | 5.089.500   | 1.627.350   | 6.045.000   | 5.993.000   | 6.300.000   | 0           | 1.044.700   | 96,26% | 86,79% | 84,85% | 0,00%  | 64,20% | -930.530    | -1.000.060  |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI

|   |                    |                    |                      |                      |                  |                    |                    |                    |                      |                  |               |               |               |               |                |                     |                     |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Penyusunan RENSTRA  | 12.450.000         | 7.400.000          | 0                    | 0                    | 0                | 11.748.000         | 5.743.000          | 0                  | 0                    | 0                | 94,36%        | 77,61%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%          | -2.490.000          | -2.349.600          |
| Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur                                   | <b>988.879.600</b> | <b>942.367.300</b> | <b>1.060.223.280</b> | <b>2.074.330.000</b> | <b>9.296.000</b> | <b>787.508.900</b> | <b>734.368.800</b> | <b>917.828.964</b> | <b>1.934.034.000</b> | <b>9.296.000</b> | <b>79,64%</b> | <b>77,93%</b> | <b>86,57%</b> | <b>93,24%</b> | <b>100,00%</b> | <b>-195.916.720</b> | <b>-155.642.580</b> |
| Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah Gol. II dan Gol. III      | 272.950.000        | 0                  | 89.680.000           | 812.580.000          | 9.296.000        | 272.950.000        | 0                  | 89.680.000         | 803.284.000          | 9.296.000        | 100,00%       | 0,00%         | 100,00%       | 98,86%        | 100,00%        | -52.730.800         | -52.730.800         |
| Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah                                 | 248.982.000        | 450.397.000        | 327.212.000          | 0                    | 0                | 121.330.000        | 299.797.000        | 276.682.000        | 0                    | 48,73%           | 66,56%        | 84,56%        | 0,00%         | 0,00%         | -49.796.400    | -24.266.000         |                     |
| Pendidikan dan Pelatihan kursus-kursus Keterampilan                                 | 50.000.000         | 0                  | 24.000.000           | 0                    | 0                | 4.430.600          | 0                  | 0                  | 0                    | 8,86%            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | -10.000.000    | -886.120            |                     |
| Bimbingan teknis penilaian angka kredit terhadap penilaian angka kredit             | 0                  | 41.937.000         | 0                    | 0                    | 0                | 0                  | 38.653.000         | 0                  | 0                    | 0,00%            | 92,17%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0              | 0                   |                     |
| Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah                       | 0                  | 59.307.000         | 0                    | 0                    | 0                | 0                  | 54.842.000         | 0                  | 0                    | 0,00%            | 92,47%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0              | 0                   |                     |
| Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Keuangan Daerah                              | 56.037.000         | 0                  | 59.334.268           | 0                    | 0                | 52.131.000         | 0                  | 56.839.000         | 0                    | 0                | 93,03%        | 0,00%         | 95,79%        | 0,00%         | 0,00%          | -11.207.400         | -10.426.200         |
| Pendidikan dan pelatihan Pengelola Barang   | 56.027.000         | 0                  | 59.996.945           | 0                    | 0                | 51.271.000         | 0                  | 56.107.100         | 0                    | 0                | 91,51%        | 0,00%         | 93,52%        | 0,00%         | 0,00%          | -11.205.400         | -10.254.200         |
| Pendidikan dan Pelatihan pelayanan Prima  | 0                  | 0                  | 109.587.993          | 0                    | 0                | 0                  | 87.997.225         | 0                  | 0                    | 0,00%            | 0,00%         | 80,30%        | 0,00%         | 0,00%         | 0              | 0                   |                     |
| Bimbingan Teknis Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai berdasarkan PP No. 46 Tahun 2011 | 77.409.000         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                | 73.240.000         | 0                  | 0                  | 0                    | 94,61%           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | -15.481.800    | -14.648.000         |                     |
| Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah                                 | 114.981.000        |                    | 0                    |                      |                  | 107.268.600        |                    |                    |                      | 93,29%           | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | -22.996.200    | -21.453.720         |                     |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA BINJAI

|   |            |             |            |   |   |             |            |            |   |        |        |        |        |       |             |             |   |
|---|------------|-------------|------------|---|---|-------------|------------|------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|-------------|-------------|---|
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Lurah                       | 0          | 56.190.100  | 0          | 0 | 0 | 0           | 53.197.600 | 0          | 0 | 0      | 0,00%  | 94,67% | 0,00%  | 0,00% | 0,00%       | 0           | 0 |
| Pendidikan dan Pelatihan Kepemerintahan yang baik (good Government) | 55.217.000 | 0           | 0          | 0 | 0 | 51.721.000  | 0          | 0          | 0 | 93,67% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | -11.043.400 | -10.344.200 |   |
| Workshop Revolusi Mental  | 0          | 62.840.000  | 73.311.672 | 0 | 0 | 53.192.000  | 60.822.439 | 0          | 0 | 0,00%  | 84,65% | 82,96% | 0,00%  | 0,00% | 0           | 0           |   |
| Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran                | 0          | 42.721.600  | 0          | 0 | 0 | 37.821.500  | 0          | 0          | 0 | 0,00%  | 88,53% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0           | 0           |   |
| Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tingkat Ahli            | 0          | 114.229.000 | 0          | 0 | 0 | 101.544.800 | 0          | 0          | 0 | 0,00%  | 88,90% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0           | 0           |   |
| Bimbingan Teknis Implementasi e-Government                          | 0          | 80.770.600  | 49.514.044 | 0 | 0 | 72.009.600  | 45.810.900 | 0          | 0 | 0,00%  | 89,15% | 92,52% | 0,00%  | 0,00% | 0           | 0           |   |
| Sosialisasi Implementasi e-Government                               | 0          | 33.975.000  | 0          | 0 | 0 | 0           | 23.311.300 | 0          | 0 | 0,00%  | 68,61% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | 0           | 0           |   |
| Bimbingan Teknis E-Kinerja  | 0          | 50.464.044  | 0          | 0 | 0 | 0           | 45.612.800 | 0          | 0 | 0,00%  | 0,00%  | 90,39% | 0,00%  | 0,00% | 0           | 0           |   |
| Bimbingan Teknis e-SDM  | 0          | 0           | 50.344.044 | 0 | 0 | 0           | 0          | 47.410.900 | 0 | 0      | 0,00%  | 0,00%  | 94,17% | 0,00% | 0,00%       | 0           | 0 |
| Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja                 | 0          | 0           | 59.971.708 | 0 | 0 | 0           | 0          | 56.158.000 | 0 | 0      | 0,00%  | 0,00%  | 93,64% | 0,00% | 0,00%       | 0           | 0 |
| Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian                              | 0          | 0           | 53.838.044 | 0 | 0 | 0           | 0          | 47.604.800 | 0 | 0      | 0,00%  | 0,00%  | 88,42% | 0,00% | 0,00%       | 0           | 0 |
| Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran                      | 57.276.600 | 0           | 0          | 0 | 0 | 53.166.700  | 0          | 0          | 0 | 92,82% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00% | -11.455.320 |             |   |
| Bimbingan Teknis E-Budgetting                                       | 0          | 0           | 52.968.518 | 0 | 0 | 0           | 0          | 47.103.800 | 0 | 0      | 0,00%  | 0,00%  | 88,93% | 0,00% | 0,00%       | 0           | 0 |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI

|   |               |               |               |               |               |             |             |             |               |              |        |        |        |         |         |             |             |  |  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--|--|
| Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah                   | 0             | 0             | 0             | 1.261.750.000 | 0             | 0           | 0           | 0           | 1.130.750.000 |              |        |        |        | #DIV/0! | 89,62%  | 0,00%       | 0           |  |  |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur                         | 1.297.081.500 | 1.164.914.000 | 1.449.437.179 | 650.470.730   | 1.054.636.295 | 885.882.350 | 954.817.400 | 875.292.650 | 584.864.440   | 629.997.387  | 68,30% | 81,96% | 60,39% | 89,91%  | 59,74%  | -48.489.041 | -51.176.993 |  |  |
| Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS                   | 66.825.000    | 99.350.000    | 103.245.948   | 29.545.330    | 44.164.645    | 59.081.400  | 95.778.500  | 92.372.300  | 23.700.300    | 7.654.800    | 88,41% | 96,41% | 89,47% | 80,22%  | 17,33%  | -4.532.071  | -10.285.320 |  |  |
| Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS              | 36.280.000    | 38.680.000    | 102.000.000   | 21.400.000    | 7.615.200     | 35.830.000  | 38.170.000  | 100.440.000 | 0             | 0            | 98,76% | 98,68% | 98,47% | 0,00%   | 0,00%   | -5.732.960  | -7.166.000  |  |  |
| Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas                    | 274.300.000   | 79.800.000    | 119.300.000   | 138.800.000   | 100.000.000   | 232.400.000 | 78.300.000  | 117.800.000 | 121.150.000   | 100.000.000  | 84,72% | 98,12% | 98,74% | 87,28%  | 100,00% | -34.860.000 | -26.480.000 |  |  |
| Penelitian dan Penseleksian Berkas usulan Satya Lencana Karya Satya | 12.310.000    | 13.370.000    | 15.206.000    | 468.000       | 0             | 9.641.000   | 9.500.000   | 13.124.000  | 0             | 0            | 78,32% | 71,05% | 86,31% | 0,00%   | 0,00%   | -2.462.000  | -1.928.200  |  |  |
| Penyelenggaraan Sumpah/janji PNS                                    | 15.480.000    | 19.130.000    | 17.317.818    | 0             | 0             | 0           | 15.867.800  | 16.326.700  | 0             | 0            | 0,00%  | 82,95% | 94,28% | 0,00%   | 0,00%   | -3.096.000  | 0           |  |  |
| Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan                          | 74.120.000    | 78.320.000    | 80.000.000    | 2.880.000     | 3.283.200     | 48.520.000  | 33.720.000  | 6.630.000   | 312.000       | 0            | 65,46% | 43,05% | 8,29%  | 10,83%  | 0,00%   | -14.167.360 | -9.704.000  |  |  |
| Penyusunan Arsip PNS/CPNS   | 9.975.000     | 11.125.000    | 12.202.100    | 0             | 0             | 0           | 0           | 11.311.200  |               | 0            | 0,00%  | 0,00%  | 92,70% | 0,00%   | 0,00%   | -1.995.000  | 0           |  |  |
| Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Struktural                | 89.564.000    | 110.564.000   | 90.747.000    | 29.520.000    | 29.132.800    | 25.200.000  | 64.250.000  | 22.200.000  | 22.600.000    | 5.650.000,00 | 28,14% | 58,11% | 24,46% | 76,56%  | 19,39%  | -12.086.240 | -3.910.000  |  |  |
| Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah                                | 8.901.000     | 34.780.000    | 31.340.000    | 0             | 0             | 8.201.000   | 30.958.000  | 28.367.000  | 0             | 0            | 92,14% | 89,01% | 90,51% | 0,00%   | 0,00%   | -1.780.200  | -1.640.200  |  |  |
| Penyusunan Buku Data Statistik Kepegawaian                          | 7.786.500     | 12.600.000    | 12.431.408    | 0             | 0             | 7.750.000   | 11.818.500  | 10.305.200  | 0             | 0            | 99,53% | 93,80% | 82,90% | 0,00%   | 0,00%   | -1.557.300  | -1.550.000  |  |  |
| Penyusunan Buku Daftar Urut Kepangkatan PNS                         | 6.150.000     | 11.550.000    | 12.449.208    | 0             | 0             | 5.629.500   | 9.800.000   | 12.123.000  | 0             | 0            | 91,54% | 84,85% | 97,38% | 0,00%   | 0,00%   | -1.230.000  | -1.125.900  |  |  |
| Seleksi Penerimaan Calon PNS  | 0             | 0             | 394.510.115   | 0             | 560.075.730   | 0           | 0           | 193.464.650 | 0             | 355.079.387  | 0,00%  | 0,00%  | 49,04% | 0,00%   | 63,40%  | 112.015.146 | 71.015.877  |  |  |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA BINJAI

|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |               |               |               |               |                     |                     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| Pengumpulan Data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai                     | 7.980.000            | 8.380.000            | 10.030.000           | 300.000              | 0                    | 7.230.000            | 7.500.000            | 8.130.000            | 0                    | 90,60%               | 89,50%        | 81,06%        | 0,00%         | 0,00%         | -1.596.000    | -1.446.000          |                     |
| Seleksi Karier Terbuka  | 687.410.000          | 419.250.000          | 246.759.468          | 328.730.000          | 123.681.820          | 446.399.450          | 390.147.800          | 106.828.200          | 320.089.740          | 22.946.200           | 64,94%        | 93,06%        | 43,29%        | 97,37%        | 18,55%        | -112.745.636        | -84.690.650         |
| Pelaksanaan Ujian Dinas   | 0                    | 31.065.000           | 0                    | 0                    | 90.232.600           | 0                    | 27.298.000           | 0                    | 0                    | 42.285.700           | 0,00%         | 87,87%        | 0,00%         | 0,00%         | 46,86%        | 18.046.520          | 8.457.140           |
| Penilaian Sasaran Kerja Pegawai   | 0                    |                      | 184.400.114          | 98.827.400           | 96.450.300           | 0                    | 0                    | 120.286.400          | 97.012.400           | 96.381.300           | 0,00%         | 0,00%         | 65,23%        | 98,16%        | 99,93%        | 19.290.060          | 19.276.260          |
| Pembekalan PNS yang mencapai batas usia pensiun                                       | 0                    | 17.350.000           | 17.498.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 13.734.000           | 15.584.000           | 0                    | 0                    | 0,00%         | 79,16%        | 89,06%        | 0,00%         | 0,00%         | 0                   | 0                   |
| Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Kinerja Aparatur Pemko Binjai | 0                    | 14.000.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0                   | 0                   |
| Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan diseluruh SKPD                                  | 0                    | 142.600.000          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 106.831.800          | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%         | 74,92%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0                   | 0                   |
| Pembinaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian  | 0                    | 23.000.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 21.143.000           | 0                    | 0                    | 0                    | 0,00%         | 91,93%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0                   | 0                   |
| <b>Jumlah</b>   | <b>3.470.499.900</b> | <b>3.717.690.130</b> | <b>4.102.273.418</b> | <b>4.093.015.950</b> | <b>2.124.207.041</b> | <b>2.640.589.642</b> | <b>3.102.810.752</b> | <b>3.122.079.440</b> | <b>3.724.048.185</b> | <b>1.473.054.776</b> | <b>76,09%</b> | <b>83,46%</b> | <b>76,11%</b> | <b>90,99%</b> | <b>69,35%</b> | <b>-269.258.572</b> | <b>-233.506.973</b> |



## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### 1. Tantangan

Tantangan yaitu analisis ancaman, cara mengatasi tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan atau organisasi yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya SDM dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
3. Belum optimalnya Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara.
4. Terbatasnya jumlah aparatur mengikuti pendidikan formal, Pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai dengan syarat kompetensi jabatan.
5. Penempatan Aparatur Sipil Negara pada suatu Jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi.
6. Motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensi masih relative rendah
7. Belum optimalnya Penerapan Teknologi Informasi dalam bidang kepegawaian
8. Terbatasnya sarana dan prasarana

### 2. Peluang.

Peluang merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi suatu organisasi untuk memanfaatkannya. Peluang tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan anggaran, akan tetapi dapat juga berupa respon masyarakat dan isu-isu yang sedang berkembang. Hal-hal yang dinilai sebagai peluang bagi Badan Kepegawaian Daerah



kota Binjai dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan kompetensi SDM aparatur.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam manajemen ASN
3. Tersedianya berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas yang menyediakan berbagai kerja sama dalam peningkatan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan Pelatihan (diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), kursus dan keterampilan.
4. Kemajuan teknologi Informasi yang semakin berkembang.
5. Adanya usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur.
6. Adanya usaha pemerintah memberikan insentif berupa tambahan penghasilan sesuai kinerja kepada aparatur.
7. Dukungan anggaran relative memadai.

#### **2.4.2 Uraian tentang Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan perangkat daerah**

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 – 2029 maka dapat kami simpulkan bahwa tidak ada hal yang spesifik dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Daerah Kota Binjai sehingga tidak ada yang perlu ditelaah berkaitan dengan RTRW dan KLHS.

#### **2.4.3 Uraian tentang macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.**

Pembangunan kepegawaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepanditempuh melalui pelaksanaan berbagai program pembangunankepegawaian dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunanpenyelenggaraan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2016. Melalui perumusan Rencana Strategi Tahun 2021-2026 , Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan manajemen kepegawaian



berupaya untuk melaksanakan pembangunan kepegawaian dengan menyerapkan kebijakan pembangunan daerah dan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan adalah program prioritas Pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026 yakni :

1. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan sistem layanan yang terintegrasi,
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas layanan public dengan pola pelayanan prima.
4. Penempatan pejabat aparatur sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).

maka program strategis tersebut diharapkan menjadi salah satu peluang dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yaitu dengan rencana pengembangan system aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi keseluruh Perangkat Daerah, Sehingga dengan tersedianya data secara elektronik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Kinerja kepegawaian yang lebih baik.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin di capai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada suatu organisasi harus dapat dilaksanakan untuk mengetahui faktor-faktor kondisi riil kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang terjadi untuk tercapainya sasaran dan tujuan 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu perlu dianalisa factor lingkungan internal dan eksternal.

##### 1. Analisa Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal organisasi baik kekuatan (*strength*) dan kelelahannya (*weakness*) harus diketahui pada setiap organisasi. Kekuatan organisasi harus dikembangkan sebaik mungkin yang nantinya dapat digunakan untuk menggerakan dan mengembangkan organisasi. Sedangkan kelemahan organisasi harus memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh penanganannya, sehingga se bisa mungkin kelemahan tersebut dapat diatasi dan didayagunakan untuk diubah menjadi kekuatan organisasi.

Berikut kondisi potensi riil kekuatan dan kelemahan internal Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai :

- a. Kekuatan (*strength*) yang memiliki keuntungan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategik , adalah sebagai berikut :
  1. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
  2. Sarana Dan Prasarana yang ada



3. Sumber daya manusia apatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, siap untuk mendukung pengelolaan program manajemen pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berbasis kompetensi serta berkinerja baik.
  4. Terjalinya koordinasi yang baik dengan lembaga diklat terakreditasi maupun instansi terkait lainnya memungkinkan pelaksanaan program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat terlaksana.
- b. Kelemahan (weakness) internal Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai apabila tidak disikapi dengan baik dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik, adalah sebagai berikut :
- 1) Masih rendahnya tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Binjai.
  - 2) Belum optimalnya pendistribusian dan penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
  - 3) Belum terbangunya system informasi database kepegawaian yang terintegrasi secara menyeluruh ke Organisasi Perangkat Daerah yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian.
  - 4) Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  - 5) Belum terakreditasinya lembaga Diklat sehingga pelaksanaan Diklat belum dapat seluruhnya terlaksana secara mandiri.

## 2. Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal, dilaksanakan untuk mengetahui keberadaan berbagai peluang (*Opportunity*) dan tantangan/ancaman (*(Threat)*) dari luar organisasi, yang berkembang yang harus dihadapi oleh organisasi. Peluang merupakan faktor eksternal yang bersifat positif yang harus digarap oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai untuk mencapai tujuan dan sasaran strateginya. Tantangan merupakan



faktor eksternal organisasi yang bersifat negatif, yang menuntut pencermatan, perhatian dan penggarapan sebaik mungkin agar keberadaannya tidak menjadi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategik Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

Berikut kondisi riil peluang (opportunity) dan tantangan / ancaman (threat) organsasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai :

a. Peluang (Opportunity) :

1. Tersedianya berbagai lembaga pendidikan yang berkualitas yang menyediakan berbagai kerja sama dalam peningkatan kualifikasi pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), kursus dan keterampilan.
2. Kemajuan teknologi Informasi
3. Adanya usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur
4. Adanya regulasi tentang Sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil dan pengukuran indeks profesionalitas ASN.
5. Semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah yang profesional dan berintegritas.

b. Sedangkan yang menjadi tantangan (*Threat*) Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam mencapai sasaran dan tujuan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan aparatur.
2. Belum terbangunya system pengembangan pola karir dan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Binjai.
3. Masih belum optimalnya kinerja Aparatur.
4. Perlunya peningkatan/penguatan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.**

Badan kepegawaian Daerah Kota Binjai mempunyai tugas dan fungsi sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu



Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan mampu mengarahkan pelaksanaan program pembangunan kepegawaian berkelanjutan untuk mendukung dan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 , yaitu: "**Mewujudkan Binjai yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius**", yang dirumuskan dalam 3 misi yaitu :

1. **Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional**, misi pertama ini mempunyai pengertian bahwa segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, melayani dan dapat dipercaya dalam mengemban amanat masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berwawasan lingkungan**, adalah upaya pemerintah sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk membangun sarana prasarana (infrastruktur) dan penunjangnya yang dibutuhkan dan memiliki daya dorong terhadap laju pertumbuhan perekonomian berbasis potensi khas daerah dengan memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat serta tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.
3. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas**, merupakan upaya pemerintah daera sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) pendidikan, mutu pendidikan , kesehatan dan kesejahteraan social dalam rangka memacu kualitas sumber daya manusia yang handal, produktif, memiliki kondisi jiwa raga yang sehat dan sejahtera serta memiliki kearifan budaya dan akhlakul kharimah.

Adapun Program Prioritas untuk mewujudkan Misi Pertama adalah :



1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam system layanan yang terintegrasi.
2. Perubahan budaya Aparatur Sipil Negara kearah melayani dan mengayomi serta peningkatan SDM berbasis akhlak dan wawasan kebangsaan.
3. Peningkatan kualitas layanan public dengan pola pelayanan prima.
4. Penempatan pejabat aparatur sipil Negara sesuai disiplin ilmu yang dimiliki (*the right man on the right place*).

Berdasarkan visi dan misi diatas, yang menjadi tugas OPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai bagaimana mewujudkan pelayanan Birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat adalah dengan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN.

Visi : “**Mewujudkan Binjai yang lebih maju, Berbudaya dan Religius**”

| No | Misi   | Permasalahan OPD  | Faktor   |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   | Penghambat   | Pendorong  |
| 1  | <b>Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Profesional</b> | Terbatasnya jumlah aparatur mengikuti pendidikan formal, Pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai dengan syarat kompetensi jabatan. | -Belum terakreditasinya Lembaga Diklat sehingga masih terbatasnya lingkup kewenangan.<br>-Motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensi masih relatif rendah | - Adanya Regulasi yang mendukung pengembangan Kompetensi SDM Aparatur.<br>-Banyaknya lembaga penyelenggara diklat. pola penyelenggaraan diklat menggunakan e-learning. |
|    |  | Penempatan Aparatur Sipil Negara pada suatu Jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan kualifikasi dan                                  | Belum tersedianya standart kompetensi jabatan  | Banyaknya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi (minimal S1)  |



| kompetensi  |     |  |   |
|---|-----|--|---|
| Belum optimalnya Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara   |     | Belum tersedianya Aplikasi Penilaian Kinerja                                     | -Adanya Regulasi tentang Sistem Manajemen Kinerja ASN<br>-Pembangunan Aplikasi Penilaian Kinerja. |
| Belum optimalnya Penerapan Teknologi Informasi dalam bidang kepegawaian                                 |     | Rendahnya jumlah aparatur yang memahami penggunaan teknologi informasi           | Kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun aplikasi maupun jaringan                            |
| Belum optimalnya SDM dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik.                                  |     | Masih rendahnya aparatur yang mengikuti diklat pemerintahan                      | Penyelenggaraan maupun pengiriman peserta diklat pemerintahan                                     |
| Belum optimalnya pemanfaatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi. |     | Masih rendahnya aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya | Peningkatan jumlah diklat baik fungsional maupun diklat teknis                                    |
| Motivasi ASN untuk mengembangkan kompetensi masih relative rendah                                       | ASN | penempatan ASN sesuai dengan Kompetensi belum terlaksana secara maksimal         | Pemberian reward dan punishment   |



### **3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (K/L) dan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagai salah satu perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Pusat, selaku lembaga Pembina dalam penyelenggaraan/pelaksanaan pembinaan dan manajemen aparatur sipil Negara .

Terdapat 4 (empat) kementerian/lembaga dan 2 perangkat daerah provinsin sumatera utara yang memiliki keterkaitan langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.
2. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
4. Komisi Aparatur Sipil Negara.
5. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara.

Dengan mengacu pada rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara diketahuibahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera utara searah dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RPJMD**

Jika ditinjau melalui rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota diantaranya dengan adalah pemanfaatan Teknologi informasi serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi,maka isu strategis tersebut diharapkan menjadi salah satu peluang dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yaitu dengan rencana



pengembangan system aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi keseluruh SKPD, pembangunan system manajemen Kinerja Pegawai (e-Kinerja) dan pengembangan system informasi Sumberdaya Aparatur lainnya secara online. Sehingga dengan tersedianya data secara elektronik tersebut melalui system jaringan yang terintegrasi kedalam diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan Kinerja kepegawaian yang baik.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi. Isu-isu pembanguna strategis tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategis dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai maupun visi dan misi pembangunan daerah.

Isu-isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai selama 5 (lima) tahun kedepan, adalah :

1. Tingkat Profesionalitas ASN di Pemerintah Kota Binjai masih sangat rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya keikutsertaan ASN mengikuti Diklat Manajerial, Teknis dan Fungsional serta masih rendahnya pemahaman dan kesadaran ASN untuk menyusun dan melaporkan SKP setiap tahunnya.
2. Penataan Sumber Daya Manusia aparatur yang belum terdistribusi sesuai formasi kebutuhan dan kempetensi.
3. Belum adanya Sistem Informasi Database Kepegawaian yang terintegrasi ke seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Binjai yang dapat mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen kepegawaian.
4. Evaluasi kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Binjai belum berdasarkan pada system penilaian kinerja berbasis merit system.



5. Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian secara maksimal
6. Penguatan reward dan punishment kepada ASN



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### 4.1.1 Tujuan.

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistik, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap perangkat daerah. Tujuan harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tujuan organisasi perangkat daerah dan didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*). Sehingga dapat dikatakan tujuan dirumuskan untuk tujuan secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi/misi kepala daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Isu yang didapatkan sebelumnya paling tidak menyangkut tentang bagaimana kebutuhan kompetensi SDM untuk menjawab tuntutan pelayanan public yang semakin meningkat. Oleh karena itu pengembangan kompetensi diikuti sertifikasi kompetensi apatatur menjadi hal yang sangat strategis dalam menjawab kebutuhan pelayanan public tersebut. Dan yang paling penting bagaimana aparatur dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Dengan demikian Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai tahun 2021-2026 :

1. **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara**
2. **Meningkatkan Tata kelola Pelayanan kepegawaian.**

##### 4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi perangkat



daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada lavel Organisasi Perangkat Daerah (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun Indikator Kinerja yang digunakan merupakan *Medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah :

1. Meningkatnya keikutsertaan ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, sosialisasi, peningkatan keahlian dan Uji Kompetensi
2. Meningkatnya Pemahaman ASN dalam menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
3. Menurunnya persentase pelanggaran disiplin ASN
4. Meningkatnya minat ASN dalam meningkatkan Pendidikan Formal (S1, S2 dan S3)
5. Meningkatkan kualitas pelayanan Kepegawaian.
6. Meningkatkan Kualitas Informasi Kepegawaian.
7. Meningkatkan pemberian penghargaan kepada ASN

#### **4.1.3 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Badan kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam table T-C. 25 berikut ini :



**Tabel T.C 25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Badan kepegawaian Daerah Kota Binjai**

| NO .   | Tujuan                                       | Indikator Tujuan  | SASARAN   | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE |      |      |      |       |      |
|--|--|---|---|-------------------|------------------------------|------|------|------|-------|------|
|  |  |   |   |                   | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)               | (6)                          | (7)  | (8)  | (9)  | (10)  |      |
| Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara | Meningkatnya keikutsertaan ASN mengikuti Diklat Kompetensi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat sesuai dengan jenjang kompetensi jabatan | 10                | 40                           | 40   | 40   | 40   | 40    |      |
|  |  |   | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis                     | 0                 | 360                          | 400  | 440  | 480  | 520   |      |
|  |  |   | Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional                 | 25                | 70                           | 110  | 120  | 150  | 150   |      |
|  |  | Meningkatnya Pemahaman ASN dalam menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)          | Persentase ASN menyusun dan melaporakan SKP setiap tahun                      | 75%               | 80%                          | 83%  | 87%  | 90%  | 99,5% |      |



|   |  |  |  |             |             |             |            |            |            |
|---|--|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Meningkatkan<br>Tata kelola<br>Pelayanan<br>kepegawaian | Meningkatnya<br>minat ASN dalam<br>meningkatkan<br>Pendidikan<br>Formal (S1 dan<br>S2) | Meningkatnya<br>minat ASN dalam<br>meningkatkan<br>Pendidikan<br>Formal (S1 dan<br>S2) | Persentase ASN yang<br>berpendidikan Tinggi                  | 72,43<br>%  | 73,10<br>%  | 73,48<br>%  | 73,78<br>% | 74,45<br>% | 75,12<br>% |
|   |  | Jumlah ASN mengikuti<br>pendidikan formal<br>(tugas belajar)                           | 2  | 3           | 4           | 5           | 6          | 6          |            |
|   |  | Menurunnya<br>persentase<br>pelanggaran<br>disiplin ASN                                | Jumlah pelanggaran<br>Pelanggaran Disiplin<br>ASN            | 12<br>Kasus | 12<br>Kasus | 10<br>Kasus | 9<br>Kasus | 8<br>Kasus | 7<br>Kasus |
|   | Persentase<br>pelayanan<br>administrasi<br>kepegawaian<br>tepat waktu                  | Meningkatkan<br>Kualitas<br>Informasi<br>Kepegawaian                                   | Tersedianya sistem<br>informasi kepegawaian                  | 2           | 1           | 1           | 1          | 1          | 0          |
|   |  | Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Kepegawaian                                   | Jumlah ASN mengikuti<br>ujian<br>Dinas/Penyesuaian<br>Izajah | 50          | 60          | 70          | 75         | 80         | 85         |
|   |  | Jumlah kenaikan<br>pangkat ASN   | 840  | 850         | 900         | 920         | 940        | 960        |            |



|  |  |   |      |      |      |      |      |     |
|--|--|---|------|------|------|------|------|-----|
|  | Jumlah ASN mendapatkan Izin Belajar                | 60  | 65   | 70   | 73   | 75   | 80   |     |
|  | Jumlah ASN Mendapatkan Cuti                        | 150   | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |     |
|  | Jumlah ASN yang mendapatkan kenaikan gaji berkala  | 1800  | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |     |
|  | Jumlah ASN yang menyelesaikan administrasi Pensiun | 220   | 225  | 230  | 235  | 240  | 245  |     |
|  | Jumlah ASN yang melaporakan LHKPN                  | 215   | 215  | 215  | 215  | 215  | 215  |     |
|  | Meningkatkan pemberian penghargaan kepada ASN      | Jumlah ASN yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya | 150  | 155  | 160  | 165  | 170  | 175 |



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategis dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome), program yang terdapat dalam RPJMD, dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas.

Dengan kata lain Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dalam perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategis merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan adalah suatu arah tindak yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan. Perumusan strategi kebijakan dituangkan dalam table T-C. 26, sebagai berikut :



**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| No. | Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Kebijakan  |
|-----|--|---|---|--|
| 1   | Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara | 1. Meningkatnya keikut sertaan ASN mengikuti Diklat Kompetensi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | a. Menjalin kerjasama dengan Lembaga Diklat Terakreditasi<br>b. Penyusunan pola karir ASN<br>c. Meningkatkan Kapasitas lembaga diklat   | a. Melaksanakan Diklat Kompetensi, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional serta Diklat Prajabatan<br>b. melaksanakan Talenta Pool<br>c. melaksanakan pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis merit sistem dan kompetensi<br>d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Diklat<br>e. Menambah WI<br>f. Akreditasi Lembaga Diklat<br>g. Peningkatan/penguatan Struktur Organisasi |
|     |  | 2. Meningkatnya Pemahaman ASN dalam menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)           | a. Meningkatkan pembinaan dan evaluasi dalam menyusun SKP   | a. Membentuk Tim Penilai Kinerja<br>b. Membangun Aplikasi e-Kinerja dan e-Absensi<br>c. Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek Sistem Manajemen Kinerja ASN  |
|     |  | 3. Meningkatnya minat ASN dalam meningkatkan Pendidikan Formal                                      | a. Menjalin kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi<br>b. Meningkatkan biaya bantuan tugas belajar.   | a. Mengirim ASN mengikuti Tugas belajar<br>b. Memberikan kesempatan yang sama kepada ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui Izin Belajar.   |
|     |  | 4. Menurunnya persentase pelanggaran disiplin ASN   | a. Meningkatkan pembinaan Disiplin ASN<br>b. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku ASN | a. Melaksanakan sosialisasi Pembinan Disiplin ASN<br>b. Memberikan reward dan punishment kepada ASN<br>c. Pembuatan aplikasi pem binaan disiplin ASN   |



|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Meningkatkan Tata kelola Pelayanan kepegawaian | 5.Meningkatkan kualitas pelayanan Kepegawaian | a. Menyediakan pelayanan kepegawaian secara terpadu<br>b. Membuat survey kepuasan pelayanan   | a. Membuat tempat pelayanan kepegawaian, konsultasi dan informasi.<br>b. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pelayanan kepegawaian<br>c. Peningkatan/penguatan Srtuktur organisasi<br>d. Hasil survey untuk pelayanan kepegawaian   |
|   |  | 6.Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian | a. Sinkronisasi database antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemerintah Kota Binjai melalui pengembangan aplikasi berbasis web/internet.<br>b. Peremajaan data yang terperogram setiap tahunya<br>c. Verifikasi database yang terencana dalam medukung web site Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dan Koneksi Sistem informasi Kepegawaian agar terintegrasi dengan data Provinsi dan BKN<br>d. Sistem database Kepegawaian yang terintegrasi secara elektornik keseluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemko Binjai | a. Pengembangan Aplikasi Kepegawaian sesuai dengan perkembangan dan perubahan Teknologi informasi<br>b. Peningkatan kapasitas SDM yang langsung menangani sisten informasi kepegawaian<br>c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja system informasi<br>d. Optimalisasi jaringan yang mendukung kelancaran up dating database, serta kerjasama dengan instansi terkait dalam penyediaan server database dan verifikasi database yang dapat mendukung web site Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai<br>e. Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung Sistem Informasi kepegawaian<br>f. Membentuk Tim percepatan pelaksanaan pengelola Sistem Informasi Kepegawaian<br>g. Pemanfaatan tanda tangan elektronik pada layanan kepegawaian |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>7. Meningkatkan pemberian penghargaan kepada ASN</p> <p>a. Penyelenggaraan sosial sasi tentang hak dan kewajiban aparatur sipil negara</p> <p>b. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada aparatur sipil negara</p> | <p>a. Penyelenggaraan sosial sasi tentang hak dan kewajiban aparatur sipil negara</p> <p>b. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada aparatur sipil negara yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan motivasi pegawai ASN dengan tujuan tercapainya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.</p> <p>c. Pemberian penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |
|--|--|--|---|



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penajaman program dan kegiatan strategis dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-2026 mencakup pengembangan sistem manajemen kepegawaian, penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian, pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian, pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian serta kegiatan strategis dalam rangka reformasi birokrasi internal Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam melaksanakan kegiatan didukung beberapa faktor sebagai berikut :

7. Sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kota Binjai
8. Sarana prasarana pelayanan kepegawaian
9. Sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan administrasi kepegawaian.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan arah kebijakan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dan dijabarkan kedalam program-program pembangunan dan kegiatan-kegiatan utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.

#### 6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh bagian dan sub bagian organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai periode 2021-2026 mempunyai program dan kegiatan sebagai berikut :



- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
    - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
    - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
    - d. Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
    - e. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Peralatan rumah tangga
    - d. Penyediaan bahan logistic kantor
    - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
    - g. Fasilitasi kunjungan tamu
    - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Pengadaan kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
    - c. Pengadaan Mebel
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan Peralatan rumah tangga
  - d. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan
  - b. Pemeliharaan Mebel
  - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - d. Pemeliharaan asset tetap lainnya
  - e. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - f. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- II. Program Kepegawaian Daerah
- 1. Kegiatan Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian
    - a. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
    - b. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
    - c. Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN
    - d. Perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
    - f. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
    - g. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
    - h. Pengelolaan data kepegawaian
    - i. Evaluasi data, informasi dan system informasi kepegawaian
  - 2. Kegiatan Mutasi dan promosi ASN
    - a. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN
    - b. Pengelolaan promosi ASN
  - 3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
    - a. Peningkatan kapasitas kinerja ASN
    - b. Pengelolaan Assesment center
    - c. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN
    - d. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
    - e. Fasilitasi sertifikasi fungsional ASN
    - f. Fasilitasi pengembangan karier dalam jabatan fungsional



4. Kegiatan Penelaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - a. Penyusuna kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  - b. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
  - c. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai
  - d. Pengelolaan tanda jasa bagi pegawai
  - e. Pembinaan disiplin ASN
  - f. Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN
  - g. Pelayanan proses izin perceraian pegawai

### III. Program Pengembangan Sumber daya manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
  - a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara Urusan Pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum.
2. Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan Kompetensi Manajerial dan fungsional
  - a. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota
  - b. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

#### **6.2. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dari beberapa program kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator Kinerjanya : Cakupan penunjang urusan Pemerintahan
2. Program Kepegawaian Daerah  
Indikator Kinerjanya : Ratio ketersedian dan kebutuhan ASN
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Indikator Kinerjanya : Indeks Profesionalitas ASN



### 6.3. Kelompok Sasaran

Kelompok Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Kelompok sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Kota Binjai
2. Pemberdayaan jabatan fungsional
3. Peningkatan Disiplin ASN
4. Peningkatan Pelayanan kepegawaian yang tepat waktu
5. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian

### 6.4. Pendanaan Indikatif

Secara umum rencana pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
2. Anggaran Belanja diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan dengan melaksanakan kegiatan :
  - a. Peningkatan kualifikasi pendidikan, Pendidikan dan pelatihan, Bimtek dll dalam rangka peningkatan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas aparatur
  - b. Pembinaan disiplin aparatur
  - c. Pengembangan teknologi dan informasi Kepegawaian dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan memperoleh data kepegawaian yang akurat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel berikut, dimana dibedakan antara indikasi rencana program utama pada tabel 5.1 dan indikasi rencana program pendukung tabel 5.2 serta indikasi program Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021-2026 secara keseluruhan pada tabel T.C.27:



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI**

Tabel T.C.27

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA, KELompOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENTRA) TAHUN 2021-2026**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI**

| Tujuan/Sasaran   | Kode            | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) | Satuan    | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021) |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |        |               |        |               |        |               |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | Unit Kerja SKPD Penanggungjawab |  |
|--|-----------------|---|--|-----------|---|---------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---|----------------|---------------------------------|--|
|  |                 |   |  |           |   |               | 2022  |               | 2023   |               | 2024   |               | 2025   |               | 2026   |               |   |                |                                 |  |
|  |                 |   |  |           | target  | Rp            | target  | Rp            | target | Rp            | target | Rp            | target | Rp            | target | Rp            | target  | Rp             |                                 |  |
| (1)  | (2)             | (3)   | (4)  | (5)       | (6)   | (7)           | (8)   | (9)           | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)   | (15)          | (16)   | (17)          | (18)  | (19)           | (20)                            |  |
| Meningkatkan Profesionalisme keikut sertaan Aparatur Sipil Negara                      | 5 03 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH  | %         | 100   | 5.378.642.677 | 100   | 6.268.130.298 | 100    | 6.492.555.510 | 100    | 6.403.637.730 | 100    | 6.599.794.729 | 100    | 6.845.426.518 | 100   | 37.741.825.324 | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Meningkatnya Pemahaman ASN dalam menyusun dan melaporkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) | 5 03 01 2.01    | Penercanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Cakupan perencanaan dan evaluasi kinerja                                   | %         | 0   | -             | 100   | 13.855.000    | 100    | 14.609.200    | 100    | 15.373.568    | 100    | 9.000.000     | 100    | 9.500.000     | 100   | 94.869.830     | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Meningkatnya minat ASN dalam   | 5 03 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen RENSTRA OPD   | Dokumen   | 0   |               | 0   |               | 1      | 7.500.000     | 0      |               | 1      | 7.500.000     | 0      |               | 2   | 15.000.000     | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Meningkatnya persentase pelanggaran disiplin ASN                                       | 5 03 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA SKPD  | Dokumen   | 0   | -             | 1   | 7.500.000     | 1      | 8.000.000     | 1      | 8.500.000     | 1      | 9.000.000     | 1      | 9.500.000     | 5   | 42.500.000     | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Menurunnya   | 5 03 01 2.02 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja   | Dokumen   | 1   | 2.949.100     | 1   | 6.355.000     | 1      | 6.609.200     | 1      | 6.873.568     | 1      | 7.148.511     | 1      | 7.434.451     | 6   | 37.369.830     | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Meningkatkan Tata kelola Pelayanan   | 5 03 01 2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Cakupan layanan Administrasi keuangan                                      | %         | 100   | 4.194.292.990 | 100   | 4.189.858.798 | 100    | 4.357.453.150 | 100    | 4.531.751.276 | 100    | 4.713.021.327 | 100    | 4.901.542.180 | 100   | 26.609.025.521 | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Meningkatnya kualitas informasi kepegawaian  | 5 03 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN  | Orang     | 39  | 3.915.398.790 | 40  | 3.883.158.798 | 41     | 4.038.485.150 | 42     | 4.200.024.556 | 43     | 4.368.025.538 | 44     | 4.542.746.560 | 44  | 24.947.839.392 | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Meningkatkan   | 5 03 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD   | orang     | 0   | -             | 9   | 306.700.000   | 9      | 318.968.000   | 9      | 331.726.720   | 9      | 344.995.789   | 9      | 358.795.620   | 9   | 1.661.186.129  | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
| Pemberian penghargaan kepada ASN   | 5 03 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Pengelola Keuangan SKPD   | orang     | 9   | 278.894.200   | 0   | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0      | -             | 0   | 278.894.200    | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
|  | 5 03 01 2.05    | Administrasi Ke pegawai Perangkat Daerah  | Cakupan layanan Administrasi Kepegawaian                                   | %         | -   | -             | 100   | 152.500.000   | 100    | 136.600.000   | 100    | 142.064.000   | 100    | 172.746.560   | 100    | 153.656.422   | 100   | 757.566.982    | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
|  | 5 03 01 2.05 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | Jumlah Sarana dan Perasrama  | unit      | 0   |               | 1   | 25.000.000    | 0      |               | 0      |               | 1      | 25.000.000    | 0      |               | 2   | 50.000.000     | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
|  | 5 03 01 2.05 02 | Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                               | Jumlah ASN   | orang     | 0   | -             | 39  | 40.000.000    | 40     | 41.600.000    | 41     | 43.264.000    | 42     | 44.994.560    | 43     | 46.794.342    | 205   | 216.652.902    | Badan Kepegawaian Daerah        |  |
|  | 5 03 01 2.05 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | Jumlah Koordinasi  | pertemuan | 0   | -             | 4   | 25.000.000    | 4      | 30.000.000    | 4      | 31.200.000    | 4      | 32.448.000    | 4      | 33.745.920    | 20  | 152.393.920    | Badan Kepegawaian Daerah        |  |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI

|  |                 |   |  |       |     |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |             |            |               |              |           |
|--|-----------------|---|--|-------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|--------------|-----------|
|  | 5 03 01 2.05 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | Jumlah Monitoring dan Evaluasi pertemuan                     | 0     | -   | 2           | 17.500.000 | 2           | 18.200.000 | 2           | 18.928.000 | 2           | 19.685.120 | 2           | 20.472.525 | 10          | 94.785.645 | Badan Daerah  | Kepegawai    |           |
|  | 5 03 01 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                          | Jumlah ASN mengikuti Sosialisasi                             | orang | 0   | -           | 40         | 45.000.000  | 40         | 46.800.000  | 40         | 48.672.000  | 40         | 50.618.880  | 40         | 52.643.635  | 200        | 243.734.515   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Cakupan layanan administrasi umum                            | %     | 100 | 580.783.900 | 100        | 806.082.000 | 100        | 788.325.280 | 100        | 842.858.291 | 100        | 798.572.623 | 100        | 830.515.528 | 100        | 4.647.137.622 | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | tahun | 1   | 9.258.300   | 1          | 11.500.000  | 1          | 11.960.000  | 1          | 12.438.400  | 1          | 12.935.936  | 1          | 13.453.373  | 6          | 71.546.009    | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | tahun | 1   | 157.846.800 | 1          | 250.000.000 | 1          | 160.000.000 | 1          | 166.400.000 | 1          | 173.056.000 | 1          | 179.978.240 | 6          | 1.087.281.040 | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 03   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Jumlah Peralatan Rumah Tangga                                | tahun | 0   | -           | 0          | -           | 1          | 50.000.000  | 1          | 75.000.000  | 0          | -           | 0          | -           | 2          | 125.000.000   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  | Jumlah Logistik kantor                                       | tahun | 1   | 76.574.500  | 1          | 91.050.000  | 1          | 94.692.000  | 1          | 98.479.680  | 1          | 102.418.867 | 1          | 106.515.622 | 6          | 569.730.669   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 05   | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                         | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan                          | tahun | 1   | 65.687.100  | 1          | 72.250.000  | 1          | 75.140.000  | 1          | 78.145.600  | 1          | 81.271.424  | 1          | 84.522.281  | 6          | 457.016.405   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          | Jumlah Bahan Bacaan  | tahun | 1   | 18.892.800  | 1          | 20.782.000  | 1          | 21.613.280  | 1          | 22.477.811  | 1          | 23.376.924  | 1          | 24.312.001  | 6          | 131.454.815   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu                              | orang | 150 | 8.056.400   | 160        | 10.500.000  | 170        | 10.920.000  | 180        | 11.356.800  | 190        | 11.811.072  | 200        | 12.283.515  | 1050       | 64.927.787    | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.06 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | orang | 93  | 244.468.000 | 100        | 350.000.000 | 110        | 364.000.000 | 115        | 378.560.000 | 120        | 393.702.400 | 125        | 409.450.496 | 663        | 2.140.180.896 | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Cakupan Barang milik daerah                                  | %     | 100 | 78.314.000  | 100        | 450.000.000 | 100        | 506.000.000 | 100        | 162.240.000 | 100        | 168.729.600 | 100        | 175.478.784 | 100        | 1.540.762.384 | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.07 01   | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas jabatan                               | unit  | 0   | -           | 0          | -           | 1          | 350.000.000 | 0          | -           | 0          | -           | 0          | -           | 1          | 350.000.000   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.07 02   | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional                           | unit  | 3   | 78.314.000  | 4          | 150.000.000 | 0          | -           | 0          | -           | 0          | -           | 0          | -           | 7          | 228.314.000   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.07 05   | Pengadaan Mebel   | Jumlah Mebel Kantor  | tahun | 0   | -           | 1          | 300.000.000 | 1          | 156.000.000 | 1          | 162.240.000 | 1          | 168.729.600 | 1          | 175.478.784 | 5          | 962.448.384   | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Cakupan jasa penunjang                                       | %     | 100 | 269.941.787 | 100        | 311.093.500 | 100        | 323.537.240 | 100        | 336.478.730 | 100        | 349.937.879 | 100        | 363.935.394 | 100        | 1.954.924.529 | Badan Daerah | Kepegawai |
|  | 5 3 1 2.08 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    | Jumlah Materai/benda Pos Kantor                              | tahun | 1   | 4.650.000   | 1          | 5.500.000   | 1          | 5.720.000   | 1          | 5.948.800   | 1          | 6.186.752   | 1          | 6.434.222   | 6          | 34.439.774    | Badan Daerah | Kepegawai |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI

|  |                |  |  |           |      |             |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |                |                            |
|--|----------------|--|--|-----------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|----------------------------|
|  | 5 3 1 2.08 02  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik     | bulan     | 12   | 180.642.287 | 12   | 219.000.000   | 12   | 227.760.000   | 12   | 236.870.400   | 12   | 246.345.216   | 12   | 256.199.025   | 72   | 1.366.816.928  | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.08 04  | Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor  | Jumlah Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor           | tahun     | 1    | 84.649.500  | 1    | 86.593.500    | 1    | 90.057.240    | 1    | 93.659.530    | 1    | 97.405.911    | 1    | 101.302.147   | 6    | 553.667.828    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09     | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Cakupan Pemeliharaan Barang milik daerah               | set       | 100  | 255.310.000 | 100  | 344.741.000   | 100  | 366.030.640   | 100  | 372.871.866   | 100  | 387.786.740   | 100  | 410.798.210   | 100  | 2.137.538.456  | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09 01  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas                    | unit      | 10   | 90.390.000  | 13   | 110.000.000   | 17   | 114.400.000   | 17   | 118.976.000   | 17   | 123.735.040   | 17   | 128.684.442   | 91   | 686.185.482    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09 05  | Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Pemeliharaan Mebel                              | tahun     | 0    | -           | 1    | 7.500.000     | 1    | 7.800.000     | 1    | 8.112.000     | 1    | 8.436.480     | 1    | 8.773.939     | 5    | 40.622.419     | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09 06  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                | tahun     | 1    | 39.150.000  | 1    | 41.150.000    | 1    | 42.796.000    | 1    | 44.507.840    | 1    | 46.288.154    | 1    | 48.139.680    | 6    | 262.031.673    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09 07  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  | Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                 | tahun     | 0    | -           | 0    | -             | 1    | 7.500.000     | 0    | -             | 0    | -             | 1    | 7.500.000     | 2    | 15.000.000     | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09 09  | Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | tahun     | 1    | 92.960.000  | 1    | 150.000.000   | 1    | 156.000.000   | 1    | 162.240.000   | 1    | 168.729.600   | 1    | 175.478.784   | 6    | 905.408.384    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 1 2.09 11  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                     | Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung     | tahun     | 1    | 32.810.000  | 1    | 36.091.000    | 1    | 37.534.640    | 1    | 39.036.026    | 1    | 40.597.467    | 1    | 42.221.365    | 6    | 228.290.498    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02         | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan ASN                   | %         | 9,38 | 912.826.200 | 0,26 | 2.515.955.600 | 0,26 | 3.326.473.824 | 0,26 | 2.419.532.777 | 0,26 | 2.516.314.088 | 0,26 | 2.532.601.852 | 11   | 14.223.704.341 | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01    | Pengadaan, Pemberhentian Dan informasi ke pegawai ASN  | Cakupan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN     | %         | 100  | 684.669.300 | 100  | 1.479.649.200 | 100  | 1.275.315.168 | 100  | 1.326.327.775 | 100  | 1.379.380.886 | 100  | 1.350.191.321 | 100  | 7.495.533.650  | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01 02 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                             | Jumlah Rencana Kebutuhan ASN                           | Dokumen   | 0    | -           | 1    | 70.000.000    | 1    | 72.800.000    | 1    | 75.712.000    | 1    | 78.740.480    | 1    | 81.890.099    | 5    | 379.142.579    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01 03 | Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK   | Jumlah Koordinasi                                      | pertemuan | 0    | -           | 4    | 35.000.000    | 4    | 36.400.000    | 4    | 37.856.000    | 4    | 39.370.240    | 4    | 40.945.050    | 20   | 189.571.290    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01 04 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | Jumlah Pengadaan ASN                                   | orang     | 404  | 556.680.100 | 283  | 850.000.000   | 250  | 884.000.000   | 255  | 919.360.000   | 260  | 956.134.400   | 265  | 994.379.776   | 1717 | 5.160.554.276  | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01 05 | Perumusan Bahan kebijakan Pemberhentian ASN  | Jumlah Perwal Pemberhentian ASN                        | Dokumen   | 0    | -           | 1    | 25.500.000    | 0    | -             | 0    | -             | 0    | -             | 0    | -             | 1    | 25.500.000     | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01 06 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | Jumlah Koordinasi Pemberhentian ASN                    | pertemuan | 0    | -           | 4    | 45.000.000    | 4    | 46.800.000    | 4    | 48.672.000    | 4    | 50.618.880    | 4    | 52.643.635    | 20   | 243.734.515    | Badan Daerah Kepergawainan |
|  | 5 3 02 2.01 10 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepergawainan   | Jumlah Sistem Informasi Kepergawainan                  | aplikasi  | 2    | 127.989.200 | 1    | 300.000.000   | 1    | 75.000.000    | 1    | 78.000.000    | 1    | 81.120.000    | 0    | -             | 6    | 662.109.200    | Badan Daerah Kepergawainan |



## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI

|                |  |  |           |      |             |     |             |            |               |     |             |     |             |            |             |            |                        |                        |                        |
|----------------|--|--|-----------|------|-------------|-----|-------------|------------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 5 3 02 2.01 11 | Pengelolaan data kepegawaian                                 | Tersedianya data dan informasi Kepegawaian                           | Dokumen   | 0    | -           | 1   | 136.649.200 | 1          | 142.115.168   | 1   | 147.799.775 | 1   | 153.711.766 | 1          | 159.860.236 | 5          | 740.136.145            | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.01 12 | Evaluasi data, Informasi, dan Sistem Informasi Kepegawaian   | Tersedianya data statistik kepegawaian                               | Dokumen   | 0    | -           | 1   | 17.500.000  | 1          | 18.200.000    | 1   | 18.928.000  | 1   | 19.685.120  | 1          | 20.472.525  | 5          | 94.785.645             | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.02    | Mutasi dan Promosi ASN                                       | Cakupan promosi ASN  | %         | 100  | 95.426.400  | 100 | 126.426.400 | 100        | 131.483.456   | 100 | 136.742.794 | 100 | 142.212.506 | 100        | 147.901.006 | 100        | 780.192.562            | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.02 02 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                             | Jumlah Kenaikan Pangkat ASN  | sk        | 1080 | 51.472.400  | 850 | 72.472.400  | 900        | 75.371.296    | 920 | 78.386.148  | 940 | 81.521.594  | 960        | 84.782.458  | 5650       | 444.006.295            | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.02 03 | Pengelolaan Promosi ASN                                      | Jumlah Pelantikan Sumpah Jabatan ASN                                 | Kegiatan  | 8    | 43.954.000  | 15  | 53.954.000  | 15         | 56.112.160    | 15  | 58.356.646  | 15  | 60.690.912  | 15         | 63.118.549  | 83         | 336.186.267            | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.03    | Pengembangan Kompetensi ASN                                  | Cakupan pengembangan Kompetensi                                      | %         | 100  | 105.638.200 | 100 | 600.000.000 | 100        | 1.613.000.000 | 100 | 637.520.000 | 100 | 663.020.800 | 100        | 689.541.632 | 100        | 4.308.720.632          | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.03 01 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                            | Jumlah ASN Mengikuti Ujian Dinas                                     | orang     | 0    |             | 80  |             |            |               | 100 |             |     |             |            | 120         | 300        | Badan Daerah Kepegawai |                        |                        |
|                |  | Jumlah ASN Mengikuti Sumpah /Janji                                   |           |      | 55.138.200  | 165 |             | 80.000.000 | 404           |     | 83.200.000  | 150 |             | 86.528.000 | 150         | 89.989.120 | 150                    | 93.588.685             |                        |
|                |  | Jumlah ASN Mengikuti Ujian Penyelesaian Ijazah                       | orang     | 50   |             | 0   |             | 90         |               |     |             |     |             |            | 110         |            | 250                    | 1.019                  | 488.444.005            |
| 5 3 02 2.03 02 | Pengelolaan Assesment Center                                 | Tersedianya Gedung Assesment Center                                  | Gedung    | 0    | -           | 0   | -           | 1          | 1.000.000.000 | 0   |             |     | 0           |            | 0           | -          | 1                      | 1.000.000.000          | Badan Daerah Kepegawai |
|                |  | Jumlah ASN mengikuti Talent Pool                                     | orang     |      |             |     |             | 150        |               | 150 |             | 150 |             | 150        |             | 150        |                        | 600                    |                        |
| 5 3 02 2.03 04 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                          | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan Formal                      | %         | 1    | 50.500.000  | 6   | 420.000.000 | 6          | 436.800.000   | 6   | 454.272.000 | 6   | 472.442.880 | 6          | 491.340.595 | 31         | 2.325.355.475          | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.03 05 | Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat                  | Jumlah Koordinasi Kerjasama Diklat                                   | pertemuan | 0    | -           | 6   | 50.000.000  | 6          | 52.000.000    | 6   | 54.080.000  | 6   | 56.243.200  | 6          | 58.492.928  | 30         | 270.816.128            | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.03 10 | Fasilitasi sertifikasi Fungsional ASN                        | Jumlah jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi                   | orang     | 65   | -           | 150 | 25.000.000  | 230        | 15.000.000    | 280 | 15.600.000  | 330 | 16.224.000  | 380        | 16.872.960  | 380        | 88.696.960             | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.03 14 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional       | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintan | orang     | 0    | -           | 30  | 25.000.000  | 35         | 26.000.000    | 40  | 27.040.000  | 45  | 28.121.600  | 50         | 29.246.464  | 200        | 135.408.064            | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.04    | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                      | Cakupan Penilaian dan evaluasi kinerja                               | %         | 100  | 27.092.300  | 100 | 309.880.000 | 100        | 306.675.200   | 100 | 318.942.208 | 100 | 331.699.896 | 100        | 344.967.892 | 100        | 1.639.257.496          | Badan Daerah Kepegawai |                        |
| 5 3 02 2.04 01 | Penyusunan kebijakan penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Perwali Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai                     | dokumen   | 0    | -           | 1   | 15.000.000  | 0          | -             | 0   | -           | 0   | -           | 0          | -           | 1          | 15.000.000             | Badan Daerah Kepegawai |                        |



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BINJAI**

|                 |   |   |          |       |               |       |                |       |                |      |                |      |                |      |                |       |                |              |           |
|-----------------|---|---|----------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|-------|----------------|--------------|-----------|
| 5 3 02 2.04 02  | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | Jumlah Sidang Tim Penikai Kinerja   | Kegiatan | 0     | -             | 12    | 55.000.000     | 12    | 57.200.000     | 12   | 59.488.000     | 12   | 61.867.520     | 12   | 64.342.221     | 60    | 297.897.741    | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 3 02 2.04 04  | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai  | Jumlah ASN yang menerima penghargaan  | orang    | 0     | -             | 20    | 150.000.000    | 20    | 156.000.000    | 20   | 162.240.000    | 20   | 168.729.600    | 20   | 175.478.784    | 100   | 812.448.384    | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 3 02 2.04 05  | Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Satya Lencana Karya Satya                                 | orang    | 0     | -             | 200   | 25.500.000     | 200   | 26.520.000     | 200  | 27.580.800     | 200  | 28.684.032     | 200  | 29.831.393     | 1000  | 138.116.225    | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 3 02 2.04 07  | Pembinaan Disiplin ASN  | Jumlah Pembinaan Disiplin ASN   | Kegiatan | 0     | -             | 4     | 25.000.000     | 4     | 26.000.000     | 4    | 27.040.000     | 4    | 28.121.600     | 4    | 29.246.464     | 20    | 135.408.064    | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 3 02 2.04 08  | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Jumlah Kasus yang tertangani  | kasus    | 12    | 27.092.300    | 12    | 31.880.000     | 10    | 33.155.200     | 8    | 34.481.408     | 6    | 35.860.664     | 6    | 37.295.091     | 54    | 199.764.663    | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 3 02 2.04 09  | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai  | Jumlah Izin Perceraian pegawai  | sk       | 0     | -             | 15    | 7.500.000      | 14    | 7.800.000      | 13   | 8.112.000      | 12   | 8.436.480      | 11   | 8.773.939      | 65    | 40.622.419     | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 04 02         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>   | Indeks Profesionalitas ASN  | indeks   | 55,00 | 1.499.233.400 | 65    | 3.930.050.000  | 68    | 4.237.252.000  | 71   | 4.250.742.080  | 75   | 4.420.771.763  | 81   | 4.597.602.634  | 81    | 22.935.651.877 | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 04 02 2.01    | Pengembangan Kompetensi Teknis  | Percentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis                         | %        | -     | -             | 18,05 | 1.370.000.000  | 20,05 | 1.424.800.000  | 22   | 1.481.792.000  | 24   | 1.541.063.680  | 26   | 1.602.706.227  | 26    | 7.420.361.907  | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 04 02 2.01 03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Percentase Aparatur Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis                          | orang    | 0     | -             | 0     | 1.370.000.000  | 18,5  | 1.424.800.000  | 20,5 | 1.481.792.000  | 22   | 1.541.063.680  | 24   | 1.602.706.227  | 26    | 7.420.361.907  | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 04 02 2.02    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | Percentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, Fungsional | %        | 1     | 1.499.233.400 | 5     | 2.560.050.000  | 5     | 2.812.452.000  | 5    | 2.768.950.080  | 6    | 2.879.708.083  | 5    | 2.994.896.407  | 29    | 15.515.289.970 | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 04 02 2.02 02 | Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota  | Akkreditasi Lembaga Diklat  | Dokumen  | 0     | -             | 0     | -              | 0     | 150.000.000    | 0    | -              | 1    | -              | 0    | -              | 1     | 150.000.000    | Badan Daerah | Kepegawai |
| 5 04 02 2.02 07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | Percentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural             | %        | 1,32  | 1.499.233.400 | 5,27  | 2.560.050.000  | 5,27  | 2.662.452.000  | 5,27 | 2.768.950.080  | 5,27 | 2.879.708.083  | 5,27 | 2.994.896.407  | 27,67 | 15.365.289.970 | Badan Daerah | Kepegawai |
|                 |   | Percentase Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional             | %        | 0,1   |               | 3     |                | 4     |                | 5    |                | 6    |                | 7    |                | 25,1  |                |              |           |
| <b>TOTAL</b>    |   |   |          |       | 7.790.702.277 |       | 12.714.135.898 |       | 14.056.281.334 |      | 13.073.912.587 |      | 13.536.880.580 |      | 13.975.631.003 |       | 74.901.181.541 |              |           |

Binjai,

2021

Pj. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KOTA BINJAI

BANDAR  
KEPEGAWAIAN KOTA BINJAI

RAHMAD FAUZISALIM, SH, MAP  
PENATA TK.I  
NIP. 198611262009031005

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah kota Binjai yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam 5 (lima) Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Binjai. Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagai salah satu perangkat Daerah Kota Binjai, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, mempunyai Indikator Kinerja seperti Tabel T-C. 28, sebagai berikut :



Tabel T-C. 28

Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No  | Indikator   | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |  |
|-----|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
|     |   |   | Tahun 2020                  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026                                     |  |
| (1) | (2)   | (3)                                     | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                                     |  |
| 1   | Indeks Profesionalitas ASN  | 29,98                                   | 55                          | 65   | 68   | 71   | 75   | 81   | 81                                       |  |
| 2   | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah            | 55                                      | 57                          | 60   | 62   | 65   | 67   | 70   | 70                                       |  |
| 3   | Tersedianya Sistem Manajemen Kinerja ASN (SKP)                                  | 0                                       | 0                           | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1  |  |
| 4   | Ratio ketersediaan dan bebutuhan ASN  | 9,77                                    | 10                          | 11   | 11,5 | 12   | 12,5 | 13   | 13                                       |  |
| 5   | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural | 53,78                                   | 55                          | 57   | 60   | 63   | 65   | 67   | 67                                       |  |
| 6   | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis                   | 0                                       | 3                           | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 7  |  |
| 7   | Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional               | 0                                       | 3                           | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 7  |  |
| 8   | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal                                 | 0,05                                    | 0,12                        | 0,15 | 0,2  | 0,25 | 0,3  | 0,35 | 0,35                                     |  |



|    |  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9  | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai kompetensi | 53,78 | 55,13 | 60,34 | 66,93 | 72,20 | 77,47 | 82,74 | 82,74 |
| 10 | Persentase pelanggaran disiplin ASN                                | 0,18  | 0,17  | 0,16  | 0,15  | 0,14  | 0,13  | 0,12  | 0,12  |
| 11 | Jumlah jabatan fungsional bersertifikat kompetensi                 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |



Untuk Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai yakni Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan pengukurannya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Target pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh pegawai ASN yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Kriteria Pengukuran Tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui 4 (empat) dimensi yakni : Kualifikasi Pendidikan Formal, Kompetensi, Kinerja dan disiplin, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

| No. | Kriteria Pengukuran           | Indikator yg digunakan                    | Bobot Penilaian | Dasar  |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|--|
| 1   | Kualifikasi Pendidikan Formal | S3  | 25              | -Permen PAN-RB nomor 38 Tahun 2018.<br>- Perka BKN Nomor 6 Tahun 2019. |
|     |                               | S2  | 20              |  |
|     |                               | S1/D-IV                                   | 15              |  |
|     |                               | D-III                                     | 10              |  |
|     |                               | D- II/I/SLTA                              | 5               |  |
|     |                               | Dibawah SLTA                              | 1               |  |
| 2   | Kompetensi                    | Diklat Kepemimpinan                       | 15              | BKN Nomor 6 Tahun 2019.  |
|     |                               | Diklat Fungsional                         | 15              |  |
|     |                               | Diklat Teknis                             | 15              |  |
|     |                               | Seminar/Workshop/kursus Magang sejenisnya | 10              |  |
| 3   | Kinerja                       | Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP 90-100)  | 30              |  |
|     |                               | Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP 76-90)   | 25              |  |
|     |                               | Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP 61-75)   | 15              |  |



|   |          |  |   |  |
|---|----------|--|---|--|
|   |          | Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP 51-60)      | 5 |  |
|   |          | Sasaran Kerja Pegawai (Nilai SKP 50-kebawah) | 1 |  |
| 4 | Disiplin | Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin       | 5 |  |
|   |          | Hukuman disiplin tingkat rigan               | 3 |  |
|   |          | Hukuman disiplin tingkat sedang              | 2 |  |
|   |          | Hukuman disiplin tingkat berat               | 1 |  |

Katagori Tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang Nilai sebagai berikut : (Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang tatacara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN) :

1. Sangat Tinggi ( 91- 100 )
2. Tinggi ( 81 - 90 )
3. Sedang ( 71 – 80 )
4. Rendah ( 61 – 70 )
5. Sangat Rendah ( 60 ke bawah)



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai pada hakekatnya merupakan Program Kerja selama 5 (lima) tahun yang akan datang dan dijadikan tolak ukur kinerja. Oleh sebab itu Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini akan dijadikan pedoman oleh seluruh Aparatur yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Untuk berhasilnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai diharapkan peran aktifnya dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel, kompeten dan profesional.

Meskipun disadari bahwa perwujudan professional ASN bukan hal yang mudah dicapai serta menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai semata selaku institusi pemerintah daerah, namun demikian mengingat Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai peran terdepan dalam mengembangkan amanat pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen PNS, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya untuk lima tahun kedepan dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang kepegawaian.

Apabila Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai mampu membawakan peran nyata di bidang kepegawaian sebagaimana diharapkan oleh *stakeholder* dan masyarakat, mudah-mudahan Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai sebagai institusi pemerintah mampu terus bertahan menghadapi perubahan lingkungannya dan dapat berkembang dalam menyelenggarakan tujuannya menghadapi kemajuan era globalisasi.

Binjai, November 2021

